



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG**

JL. ADE IRMA NO. 06 WALIKOTA, KUPANG – NTT 85228

TELEPON 0380 - 8431324, 881340

LAMAN <https://kkp.go.id> SUREL skipm.kupang@kkp.go.id

Yth. Sekretaris BPPMHKP

Gedung Mina Bahari II lantai 6

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110

Kupang, 21 Juli 2025

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.442/SKIPM.KPG/TU.140/IV/2025

No	Jenis yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal :

Tanda tangan :

Nama jelas :

Setelah ditandatangani, harap dikirimkan kembali melalui email
skipm.kupang@kkp.go.id.



Kepala Stasiun KIPM Kupang,

Ridwan



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II TAHUN 2025

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Kupang

**Badan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Hasil
Kelautan dan Perikanan**

Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang (LKj SKIPM Kupang) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Kupang dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun Anggaran 2025 adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Kupang Tahun Anggaran 2025.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Stasiun KIPM Kupang di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan selanjutnya.



Kupang, 18 Juli 2025
Kepala Stasiun KIPM Kupang

Ridwan, S.St.Pi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	7
BAB I. PENDAHULUAN	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI	12
1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	13
1.4 STRATEGI ORGANISASI	15
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	18
2.2. PENGUKURAN KINERJA.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. CAPAIAN KINERJA	21
3.2. ANALISIS DAN EVALUASI	23
S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN	23
IKS.01.1.Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	24
IKS.01. 2.Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	28
IKS.01.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	35
IKS.01.4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	38
S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR.....	43
IKS.02.1. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	43
IKS.02.2.Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	44
S.03. Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.....	44



**LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN II TA. 2025**



IKS.03.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	45
IKS.03.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang...	47
IKS.03.3 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	48
IKS.03.4 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	48
IKS.03.5 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	49
IKS.03.6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang.....	50
IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	51
IKS.03.8 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	52
IKS.03.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Kupang	52
3.3. Realisasi Anggaran	54
3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran.....	55
BAB III. PENUTUP	57
3.1 KESIMPULAN	57
3.2 REKOMENDASI.....	57
LAMPIRAN	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Kupang	15
Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025	21
Gambar 3. Tangkap Layar Indeks Profesionalitas ASN Pada Website ropeg.kkp.go.id	49
Gambar 4. Dashboard SIDAK KKP Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025	51
Gambar 5. Grafik Nilai SKM Per Unsur	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2025 Lingkup Stasiun KIPM Kupang.....	8
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SKIPM Kupang Tahun 2025	18
Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025.....	21
Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	24
Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	43
Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	45
Tabel 7. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan	55
Tabel 8. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	55



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai suatu *outcome/impact* dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan Stasiun KIPM Kupang selama Triwulan II Tahun 2025. Nilai capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 112,96% (Kategori Istimewa). Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun KIPM Kupang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM KUPang pada periode Triwulan II tahun 2025 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025, terdapat 9 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target dan 6 Indikator Kinerja yang belum memiliki realisasi pada Triwulan II, karena target pencapaian dilakukan per semester atau tahunan.
- B. Uraian Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target adalah sebagai berikut :
 - 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 6. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
 - 7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang
 - 8. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Kupang
 - 9. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Kupang



C. Uraian Indikator Kinerja Kegiatan yang belum memiliki nilai capaian pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Kupang
2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kupang
3. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Stasiun KIPM Kupang
4. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Kupang
5. Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Kupang
6. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup Stasiun KIPM Kupang

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2025 Lingkup Stasiun KIPM Kupang

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	100	120
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	94,12	120
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	1	1	100
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99	100	101,01
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	



**LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN II TA. 2025**



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	85	99,78	117,39
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	-	-	
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	75	86	114,67
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85	100	117,65
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76	100	120,00
		14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	-	-	
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	88	94,56	107,45

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

Capaian Kinerja keuangan Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I telah terealisasi sebesar Rp. 1.599.753.118,- atau sebesar 36,18% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.422.198.000,-. Anggaran Stasiun KIPM Kupang tahun 2025 mengalami pemblokiran anggaran sebesar Rp. 1.291.609,-. Namun pemblokiran anggaran ini tidak mempengaruhi capaian kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan II tahun 2025, hal ini dibuktikan dengan capaian kinerja organisasi sebesar 112,96, dimana kegiatan masih tetap terlaksana dengan baik dengan anggaran yang tersedia.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj) Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:



- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pelaporan dilakukan menggunakan metode *bottom-up*. Data diperoleh dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang dibuat secara terpisah dari laporannya Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Stasiun KIPM Kupang berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra). Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.



Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama Gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. LKj Triwulan I Tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama dan/atau sampai dengan triwulan IV tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Kupang.

1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi Stasiun KIPM Kupang mengacu pada visi BPPMHKP, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, Stasiun KIPM Kupang mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Stasiun KIPM Kupang sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2025, yaitu:



1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2025, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Kupang sebagai UPT BKIPM turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai Upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Stasiun KIPM Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Saat ini Stasiun KIPM Kupang masih menunggu terbitnya struktur organisasi dan tata kerja yang terbaru. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

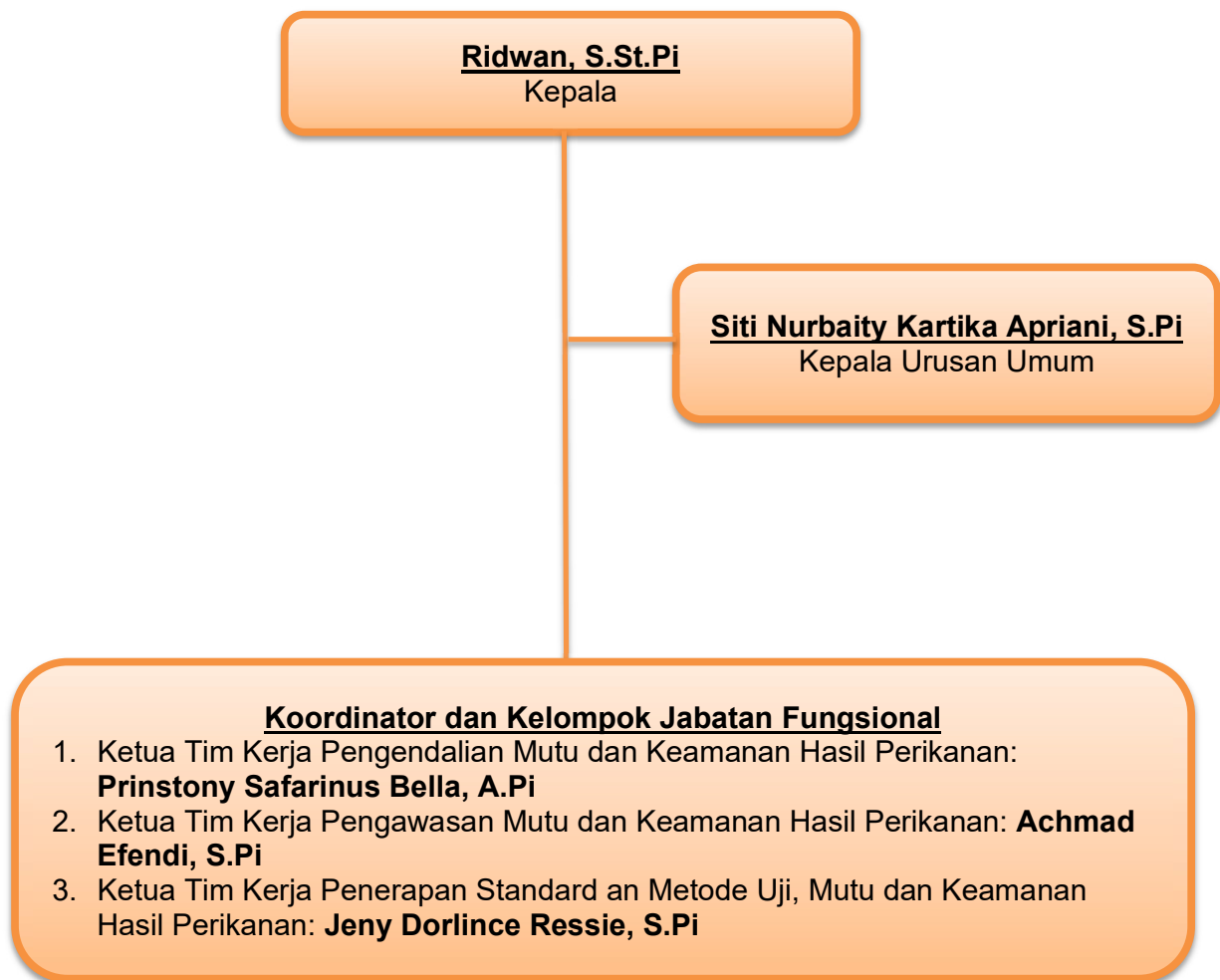


- b) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh produk hasil kelautan dan perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- e. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Kupang, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Pelayanan dan Pelaksana Koordinasi Urusan Pengawasan, Pengendalian dan Informasi, dan 5 Orang Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, 2 orang Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, 1 Orang Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil dan 4 orang Fungsional Umum serta 10 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 7 orang Tenaga Kontrak (PJLP). Struktur organisasi Stasiun KIPM Kupang dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Kupang

1.4 STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM Balikpapan dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai di ekspor ke negara tujuan. Penjaminan keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi



primer dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi.

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;



- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Pada Tahun 2025, ada 3 (tiga) sasaran kegiatan yang ditetapkan yaitu: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan, Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar, dan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP. Selanjutnya berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, ada 15 Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Daftar sasaran kinerja, indikator kinerja serta target kinerja SKIPM Kupang pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SKIPM Kupang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	1



**LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN II TA. 2025**



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	88

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.



Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :

a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

5.

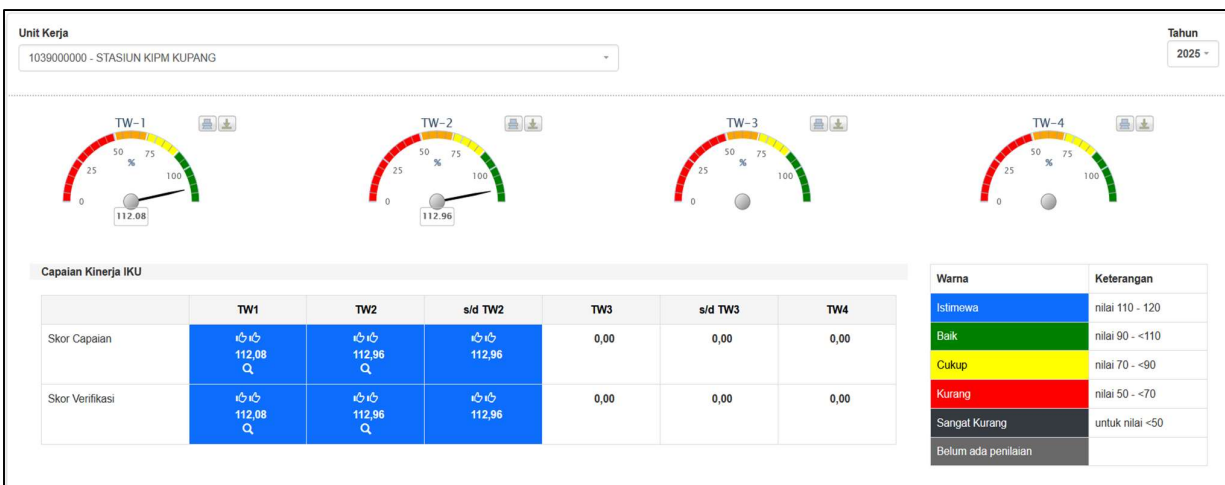
BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 – 120 Istimewa	90 -< 110 Baik	70 -< 90 Cukup	50 -< 70 Kurang	<50 Sangat Kurang



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 memiliki nilai Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) selama Triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 112,96 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Perhitungan nilai NPSS semula adalah 112,96; nilai hasil verifikasi juga sama yaitu 112,96 dimana artinya data dukung yang dilampirkan sudah sesuai dengan capaian hasil kinerja. Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Triwulan II Tahun 2025. Nilai – nilai capaian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025

Secara rinci capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Strategis Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN
SK.1	Terselenggara ya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	100	120



**LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN II TA. 2025**



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN
	Kelautan Perikanan	2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70	94,12	120
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	1	1	100
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99	100	101,01
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	85	99,78	117,39
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	-	-	
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	75	86	114,67
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	-	-	
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85	100	117,65



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II	CAPAIAN
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76	100	120,00
		14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	-	-	
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	88	94,56	107,45

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil berdasarkan indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Stasiun KIPM Kupang, adalah sebagai berikut :

S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Kupang
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Kupang
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Kupang
4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang



Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029
		Realisasi Triwulan II	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%	Target
S01. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						
IKS 01.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	70	100	120,00	70
IKS.01.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	70	94,12	120,00	70
IKS.01.3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	1	1	1	100	1
IKS.01.4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	99	100	101,01	99

IKS.01.1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di



kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. BPPMHKP Kupang saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari:

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Pada Triwulan II, terdapat satu Kapal penangkapan ikan yang melakukan permohonan sertifikasi CPIB Kapal, dan sudah dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu BPPMHKP Kupang sampai terbit



satu sertifikat CPIB Kapal atas nama KM. Tribun Timur 11. Selain itu, terdapat beberapa kapal yang telah berkoordinasi untuk melakukan proses permohonan termasuk beberapa kapal di Larantuka dan di Maumere, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Atas Kapal

$$\text{Pengukuran} = \frac{1 \text{ Sertifikat CPIB Kapal}}{1 \text{ Permohonan CPIB Kapal}} \times 100\% = 100\%$$

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan sertifikasi pada triwulan II masih nihil, dimana pada saat ini para pembudidaya masih terkendala untuk melengkapi persyaratan logam berat yang belum bisa dilakukan uji di Nusa Tenggara Timur. Sehingga membutuhkan waktu untuk pengujian parameter logam berat dari proses pengiriman sampel sampai diterimanya hasil uji.

Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

$$\text{Pengukuran} = \frac{0 \text{ Sertifikat CPIB Pembenihan}}{0 \text{ Permohonan CPIB yang memenuhi persyaratan}} \times 100\% = 0$$

Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. sertifikasi pada triwulan II masih nihil, namun sudah ada informasi 1 permohonan di OSS, atas nama Natalia Lerick yang berlokasi di Kota Kupang.

Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

$$\text{Pengukuran} = \frac{0 \text{ Rekomendasi CBIB}}{0 \text{ Permohonan CBIB yang memenuhi persyaratan}} \times 100\% = 0$$

Indikator Kinerja tahun 2025 ini merupakan indikator kinerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024, namun dengan trend yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, dimana pada per triwulan I dan II, kegiatan sertifikasi sama-sama masih dengan capaian target yang rendah, namun akan meningkat dengan signifikan pada periode Triwulan berikutnya. Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.000.000, yang belum direalisasikan pada tahun 2025, dan akan mulai dilaksanakan pada Triwulan III tahun



2025. Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB Kapal, CPIB dan CBIB pada TW II sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 Inspektur 1 auditor CPIB/CBIB, dan didukung oleh Perwakilan 2 orang penyuluh perikanan BRSDMKP.

Akar Masalah

- Sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPIB Kapal perikanan

- UUPI baik itu budidaya maupun pelaku pembenihan mempunyai kendala dalam melakukan permohonan ke OSS, dikarenakan kendala SDM, Dan pada saat ini para pembudidaya masih terkendala untuk melengkapi persyaratan logam berat yang belum bisa dilakukan uji di Nusa Tenggara Timur, sehingga membutuhkan waktu untuk pengujian parameter logam berat dari proses pengiriman sampel sampai diterimanya hasil uji.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Program percepatan dilakukan di BPPMHKP Kupang dengan mendata keberadaan dan kesiapan persyaratan kapal yang dilakukan secara realtime. Termasuk adanya kendala tidak adanya sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh PPN Pengembangan.
2. Inspektur Mutu BPMHKP Kupang melakukan bimbingan dan pendampingan langsung kepada pada pembudidaya yang akan melakukan permohonan sertifikasi, dengan turun langsung ke unit budidaya/pembenihan untuk melakukan bimbingan dan pendampingan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan para pengguna jasa, stakeholders terkait, dan intansi terkait melalui grup WAG untuk mengumpulkan informasi, permasalahan, dan solusi dalam proses sertifikasi tersebut.

Rekomendasi rencana aksi:

1. Melakukan koordinasi dengan DJPT, DJPB, dan BRSDM terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis
2. BPMHKP Kupang melakukan bimbingan dan pendampingan langsung kepada pada pembudidaya yang akan melakukan permohonan sertifikasi



IKS.01. 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan / budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi pasca panen Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier / Sertifikat Distribusi Ikan yang Baik (SPDI);
- b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- c. Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);



Pada Triwulan II tahun 2025 SKIPM Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi antara lain:

- a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- b. Sertifikat HACCP
- c. Surat Keterangan Penerapan HACCP di Supplier;

Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain :

1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
2. Unit penanganan ikan hidup;
3. Unit penanganan rumput laut kering;
4. Gudang beku;
5. Gudang dingin;
6. Gudang kering, dan/atau
7. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) / Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan



sertifikasi Penerapan PMMT/HACCP melalui HACCP Online System (HONEST) dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha dari OSS;
2. Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar) dari OSS;
3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari BPPMHKP;
4. Rancangan Panduan Mutu Penerapan HACCP tervalidasi;
5. Rekaman Audit Internal

Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 14 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 13 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.

Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP. Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS. Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS. Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi diupload pada SKP online.

1. Capaian indikator SKP di tingkat UPT diperoleh dari perbandingan jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang terbit dengan total seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan diupload pada SKP Online Per Triwulan. Pada triwulan 2 tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang melakukan pemeriksaan/verifikasi permohonan sertifikasi SKP sebanyak 17 permohonan dan telah terbit Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebanyak 15 ruang lingkup sehingga target tercapai 84,12%.
2. Capaian indikator HACCP diperoleh dari perbandingan Jumlah sertifikat HACCP yang



terbit dengan jumlah permohonan (ruang lingkup) yang diterbitkan BPPMHKP dan diupload pada honest (haccp online system) per triwulan. Pada triwulan 2 tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang terdapat 1 (Satu) permohonan Sertifikasi HACCP (perpanjangan) dan telah dilakukan inspeksi dan terbit 1 Sertifikat HACCP ruang lingkup Dried Seaweed dari 1 Unit Pengolahan Rumput Laut.

3. Capaian Indikator Produksi Pasca Panen diperoleh dari Realisasi Capaian IK Lingkup Pasca Panen dibandingkan dengan Jumlah Sertifikasi lingkup Pasca Panen dalam 1 triwulan.

$$X = \frac{A + B}{X_n}$$

X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikasi SKP

B = Persentase Penerbitan Sertifikasi HACCP

X_n = Jumlah Unsur Pembentuk

$$X \% = \frac{88,24}{2} + \frac{100}{2} = \frac{188,24}{2} = 94,12 \quad X = 94,12 \%$$

Berdasarkan perhitungan rumusan diatas capaian Indikator Produksi Pasca Panen Lingkup Stasiun KIPM Kupang sebesar 134,46 % dan melebihi target semula 70% dan realisasi sebesar 94,12 %. Output dari kegiatan Sertifikasi Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang triwulan yaitu :

- a. 15 Sertifikat SKP dari 17 rekomendasi dari 4 Unit Usaha Pengolahan Ikan dengan ruang lingkup produk
- b. 1 Sertifikat HACCP di sebanyak 1 UPRL dengan ruang lingkup produk Dried Seaweed.



LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG TRIWULAN II TA. 2025



Ruang Lingkup Sertifikasi SKP Triwulan II Tahun 2025

No.	Unit Pengolahan Ikan	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal Terbit
1.	CV. Sinar Asia Jaya Selalu	Demersal Segar	B	202504091240002479783/ NO: 150723018512300000001
2.	CV. Sinar Asia Jaya Selalu	Tuna Segar	B	202504091516308242364/ NO: 150723018512300000004
3.	CV. Sinar Asia Jaya Selalu	Pelagic Segar	B	202504091509489713175/ NO: 150723018512300000003
4.	PT. Ching Hwa Indonesia	Pelagic Beku	B	202502261631212001155/ NO: 812001011157400090003
5.	PT. Ching Hwa Indonesia	Demersal Beku	B	202502171350076127729/ NO: 812001011157400080001
6.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Tuna Steak Beku	A	202503200919049719684/ NO: 02201061128770001000
7.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Fillet Demersal Segar	A	202503201028298356668/ NO: 022010611287700020006
8.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Fresh Demersal Tanpa Kepala Buang Isi	A	202503201025047936722/ NO: 022010611287700020005
9.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Tuna Steak Segar	A	202503201013067939687/ NO: 022010611287700020004
10.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Tuna Loin Segar	A	202503201017472564689/ NO: 022010611287700020003
11.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Demersal Segar	A	202503201021047865548/ NO: 022010611287700020002
12.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Tuna Saku Beku	A	202503200939546285188/ NO: 022010611287700010006
13.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Tuna Loin Beku	A	202503200948342312920/ NO: 022010611287700010005
14.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Demersal Utuh Beku	A	202503200953453683113/ NO: 022010611287700010004
15.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Fillet Demersal Beku	A	202503201007556855306/ NO: 022010611287700010003

Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP di Unit Pengolahan Ikan Triwulan II Tahun 2025

No.	Unit Pengolahan Ikan / Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal
1.	CV. Agar Kembang	Dried Seaweed	B	001-HACCP-SPL/27/VI/2025 30 Juni 2025

Ruang Lingkup Surat Keterangan Penerapan HACCP di Supplier Triwulan II Tahun 2025

No.	Unit Pengolahan Ikan / Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal
1.	CV. Giovanni Sukses Mandiri	Frozen Tuna (Whole)	Cukup	001-HACCP-SPL/27/VI/2025 30 Juni 2025

Untuk mendukung kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan rician sebagai berikut :

1. Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan Rp.30.000.000,-
2. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Unit Pengolahan Ikan Skala UMKM dan Menengah Besar Rp. 35.000.000,-
3. Sertifikasi Penerapan PMMT/HACCP Ruang Lingkup Produk pada Unit Pengolahan Ikan Rp. 35.000.000,-

LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG TRIWULAN II TA. 2025

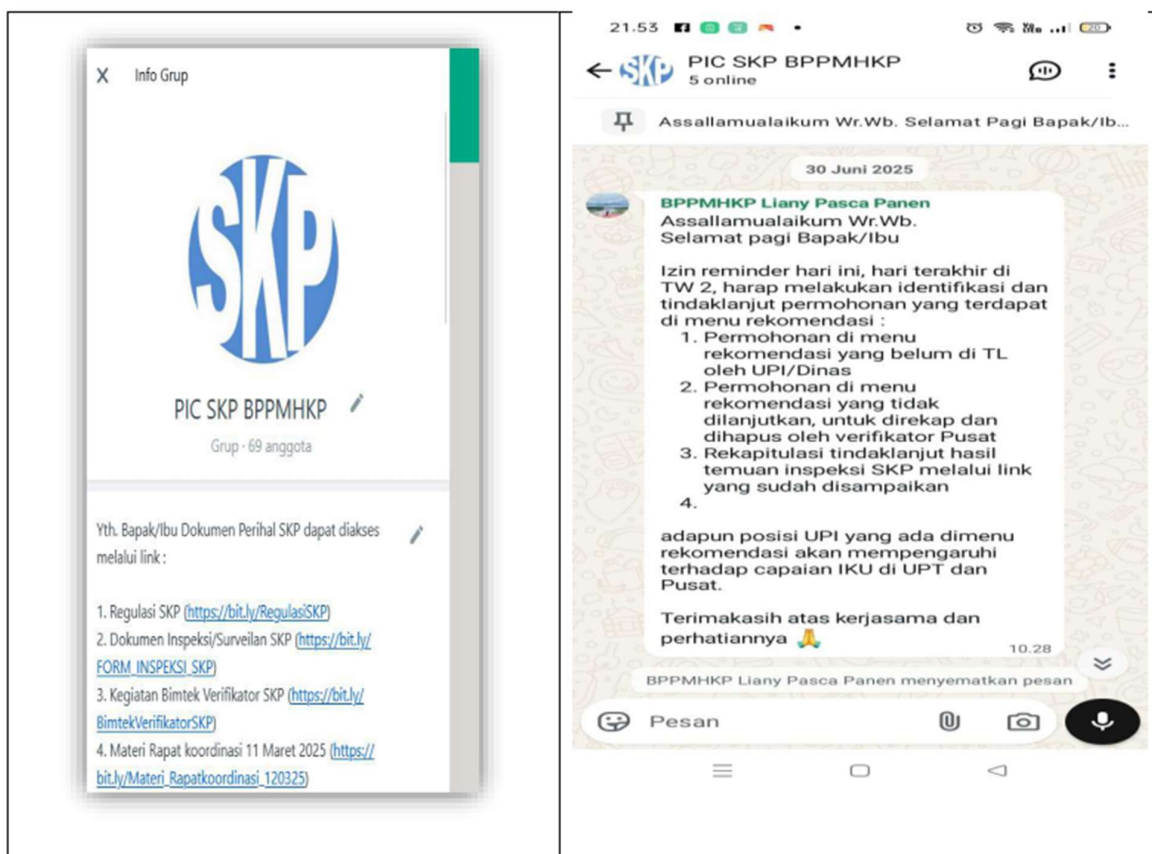
Realisasi Anggaran pada kegiatan Produksi Pasca Panen pada triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran sebesar Rp.100.000.000,-

No.	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sertifikasi SPDI	30.000.000	-	30.000.000
2.	Sertifikasi SKP	35.000.000	600.000	34.600.000
3.	Sertifikasi PMMT / HACCP	35.000.000	-	31.667.500
	Jumlah	100.000.000	3.932.500	68.332.500

Jumlah sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan verifikasi SKP dan Inpeksi Penerapan Manajemen Mutu Terpadu / HACCP adalah sebanyak 6 orang Inspektur Mutu dari Stasiun KIPM Kupang.

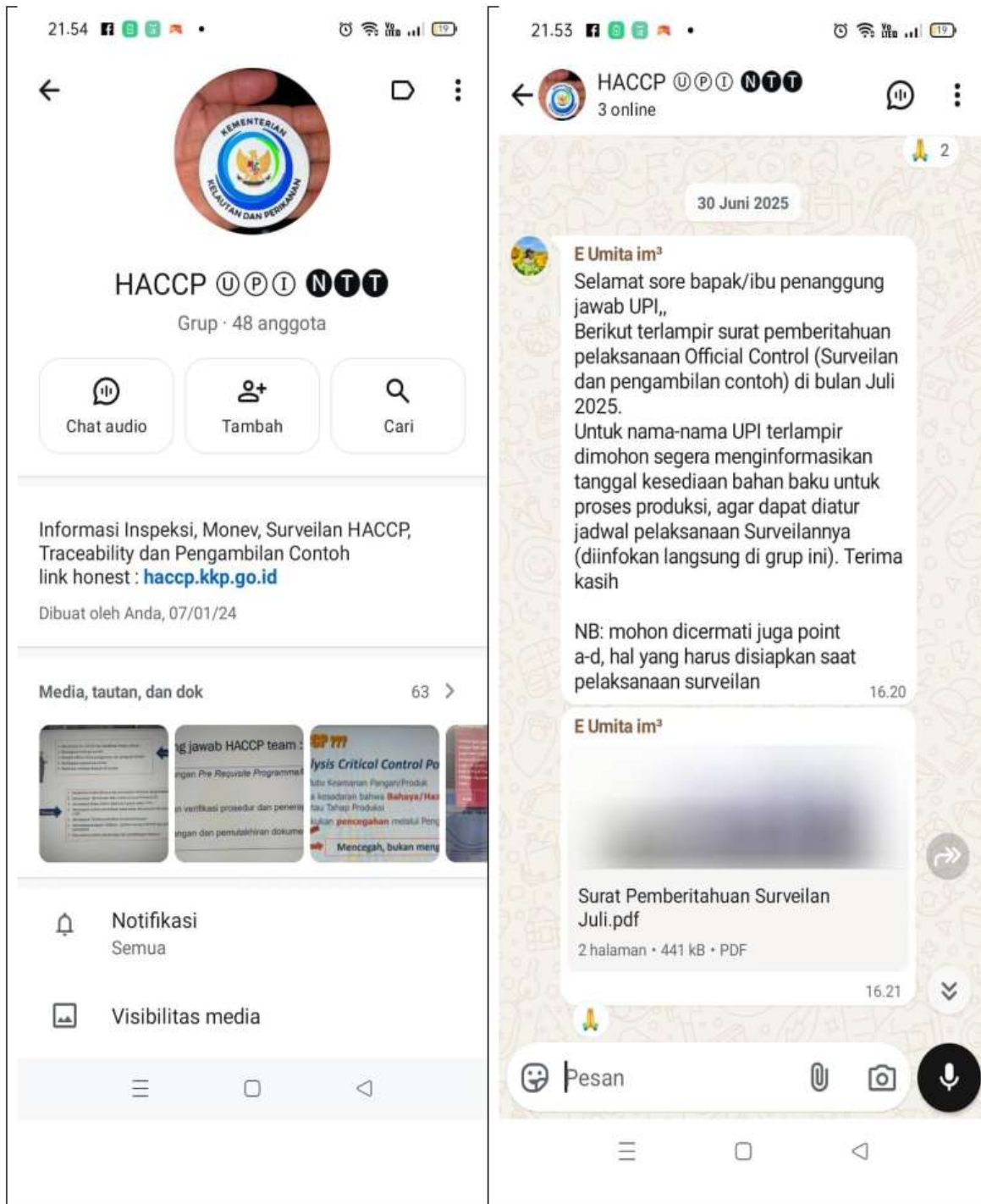
Tindakan yang telah dilaksanakan :

Melakukan komunikasi antara petugas pemeriksa permohonan SKP UPT dengan Verifikator Pusat melalui whats up group PIC SKP BPPMHKP untuk mengingatkan dalam melakukan pemeriksaan sesuai norma waktu yang ditetapkan.



LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG TRIWULAN II TA. 2025

- Melakukan komunikasi dengan Pelaku Usaha dengan Inspektur Mutu UPT dalam *whats up group HACCP UPI NTT* untuk penerapan HACCP dan perpanjangan Sertifikat HACCP.





Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Melakukan Koordinasi dengan Bidang Pembinaan Mutu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi / Kota / Kabupaten terkait SKP	Timja Pengendalian dan Penawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Verifikator Pusat terkait sertifikasi SKP	Timja Pengendalian dan Penawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025
Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi Produksi Pasca Panen (SKP, SPDI, HACCP)	Timja Pengendalian dan Penawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Tim Pasca Panen BPPMHKP terkait refreshment / bimtek HACCP, SKP, SPDI / SK HACCP Supplier untuk Inspektur Mutu	Timja Pengendalian dan Penawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025

IKS.01.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Semester 1 Tahun 2025 ini sudah dilaksanakan pada 1 Lokasi yaitu Kota Kupang dengan Lokus Pasar tradisional yaitu Pasar Inpres dan Pasar Oeba. Oleh karena itu, capaian kinerja Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Semester 1 Tahun 2025 ini yaitu 1 lokasi dari target pada Triwulan II atau semester 1 yaitu 1 lokasi sehingga realisasi adalah 100%.

Tindakan yang telah dilaksanakan

A. Penilaian sarana dan prasarana

Perhitungan bobot penilaian sarana prasarana dengan rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$



Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria	Nilai	Kriteria ditemukan
Sangat Baik	100	0
Baik	75	0
Cukup	50	0
Kurang	30	2
Total		2

Maka perhitungan yang dilakukan adalah penjumlahan dari kriteria baik sekali, kriteria baik, kriteria cukup dan kriteria buruk

$$\frac{0 \times 100}{2} + \frac{0 \times 50}{2} + \frac{2 \times 30}{2} = 30.00$$

B. Penilaian pengujian produk

Penilaian bobot pengujian produk dilakukan berdasarkan nilai/skor parameter hasil uji yang terdiri dari minimum 5 parameter yakni organoleptik, bakteri ALT, E. coli, bakteri Salmonella dan Formalin. Kriteria dari 5 parameter tersebut sebagai berikut :

$$\text{Rata - rata} = 1/n \sum_{(i=1)}^n \bar{Y}_{(i)}$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey ditemukan nilai organoleptik dari produk. Maka rata-rata didapatkan dengan :

$$(01 + 02 + 03 + 0n) / n = \dots \times 10 = \dots$$

$$(8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 7,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 7,0 + 8,0 + 8,0) / 11 = 7,867 \times 10 = \mathbf{78,73}$$

Perhitungan kriteria ALT, bakteri E.coli, Salmonella, Formalin dan Histamin rumus :
Total nilai kriteria = (kriteria ditemukan × nilai) / (total kriteria ditemukan)

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria ALT	Kriteria ditemukan	Kriteria E.coli	Kriteria ditemukan	Kriteria Salmonella	Kriteria ditemukan	Kriteria Formalin	Kriteria ditemukan	Kriteria Histamin	Kriteria ditemukan	Nilai/skor
>5 x 10 ⁵	2	>3	7	Positif	0	Negatif	0	>100 mg/kg	0	10
<5 x 10 ⁵	9	<3	4	Negatif	11	Negatif	11	<100 mg/kg	2	100

Perhitungan ALT dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >5 x 10⁵ dan <5 x 10⁵

$$\frac{2 \times 10}{11} + \frac{9 \times 100}{11} = 83,64$$

Perhitungan bakteri E.coli dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >3 dan <3

$$\frac{7 \times 10}{11} + \frac{4 \times 100}{11} = 42,73$$



Perhitungan bakteri Salmonella dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{11} + \frac{11 \times 100}{11} = 100$$

Perhitungan Formalin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{11} + \frac{11 \times 100}{11} = 100$$

Perhitungan Histamin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >100 mg/kg dan <100 mg/kg

$$\frac{0 \times 10}{2} + \frac{2 \times 100}{2} = 100$$

Penilaian rata-rata dari pengujian produk didapatkan dengan rumus rata-rata

$$rata - rata = 1/n \sum_{(i=1)}^n Y_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai organoleptik dari produk = **78,73**
2. Nilai kriteria bakteri ALT = 83,64
3. Nilai kriteria bakteri E.coli = 42,73
4. Nilai kriteria bakteri Salmonella = **100**
5. Nilai kriteria Formalin = **100**
6. Nilai kriteria Histamin = **100**

Maka rata-rata nilai pengujian produk didapatkan dengan

$$\frac{78,73 + 83,64 + 42,73 + 100 + 100 + 100}{6} = 84,18$$

C. Penilaian jaminan mutu

$$Jaminan\ mutu = (60\% \times nilai\ sarana\ prasarana) + (40\% \times nilai\ pengujian\ produk)$$

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai sarana prasarana = **30,00**
2. Nilai pengujian produk = **84,18**

$$(60\% \times 30) + (40\% \times 84,18) = 61,58\%$$

Secara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kota Kupang pada semester I (satu) Tahun 2025 : **51,60%** dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan **38,42%** dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan.



IKS.01.4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari wilayah Republik Indonesia Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus dilengkapi SMKHP. Kewajiban melengkapi SMKHP sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk barang bawaan penumpang dan/atau pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SMKHP dipersyaratkan untuk Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari Negara Republik Indonesia untuk tujuan:

- a. konsumsi; dan
- b. nonkonsumsi.

SMKHP untuk Hasil Perikanan konsumsi dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan:

1. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CBIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu;
2. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CPIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu; atau
3. berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu.

SMKHP untuk Hasil Perikanan nonkonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan berasal dari unit usaha yang memiliki SKP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan / budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.



Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat **SMKHP** adalah sertifikat untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Hasil Perikanan yang tercantum di dalamnya telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SMHKP terdiri dari beberapa jenis / model dengan negara tujuan yang berbeda antara :

- SMKHP untuk Non Negara Mitra (Model H); contoh : Singapura, Timor Leste, Australia dan Malaysia;
- SMKHP untuk Negara Mitra (Model A,B,C,D,E,F dan G) merupakan jenis SMKHP yang telah disepakai oleh negara tujuan sesuai bentuk dan isinya; Contoh : USA, Uni Eropa, Inggris, China, Korea, Vietnam.

Pada Triwulan II tahun 2025 SKIPM Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi SMHKP antara lain:

- a. Sertifikat SMKHP ke Negara Non Mitra;

Capaian Indikator Ekspor Hasil Perikanan Yang diterima Negara Tujuan Ekspor diperoleh dari Jumlah SMHKP yang diterbitkan UPT BPPMHKP dikurangi dengan Jumlah SMHKP yang ditolak negara tujuan dan diperbandingkan dengan jumlah SMHKP yang ditolak negara tujuan ekspor.

$$X = \frac{A - B}{A} \times 100 \%$$

X = Rasio Hasil Kelautan dan Perikanan yang Diterima Negara Tujuan Ekspor (%)

A = SMHKP yang diterbitkan UPT BPPMHKP

B = Jumlah SMHKP yang ditolak negara tujuan

$$X = \frac{265 - 0}{265} = \frac{265}{265} \times 100\% = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan rumusan diatas realisasi capaian Indikator Ekspor Hasil Perikanan yang diterima negara tujuan Lingkup Stasiun KIPM Kupang sebesar 100% dan melebihi target semula 99% karena tidak ada penolakan terhadap SMKHP atau Hasil Perikanan yang diekspor. Output dari kegiatan Sertifikasi SMKHP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu :



- a. 366 Sertifikat SMKHP Model H untuk negara Non Mitra yang mengirim ke negara Timor Leste, Singapura, Malaysia, Australia dan Chili berupa Ikan Demersal Segar, Ikan Pelagis Segar, Ikan Demersal Beku, Ikan Demersal segar, Ikan Kering dan Powder Rumput Laut.

Untuk mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan rician sebagai berikut :

1. Evaluasi Penerbitan HC di UPI Rp.10.000.000,-

Realisasi Anggaran pada kegiatan Evaluasi penerbitan HC (SMKHP) pada triwulan II tahun 2025 sebesar Rp.0,- atau 0% dari anggaran sebesar Rp.10.000.000,- hal ini dikarenakan adanya pemblokiran anggaran.

No.	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Evaluasi Penerbitan SMKHP	10.000.000	0	10.000.000
	Jumlah	10.000.000	0	10.000.000

Jumlah sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan Evaluasi Penerbitan SMKHP adalah sebanyak 6 orang Inspektur Mutu, 1 Orang Asisten Inspektur Mutu dan 4 orang tenaga administrasi perkantoran dari Stasiun KIPM Kupang.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

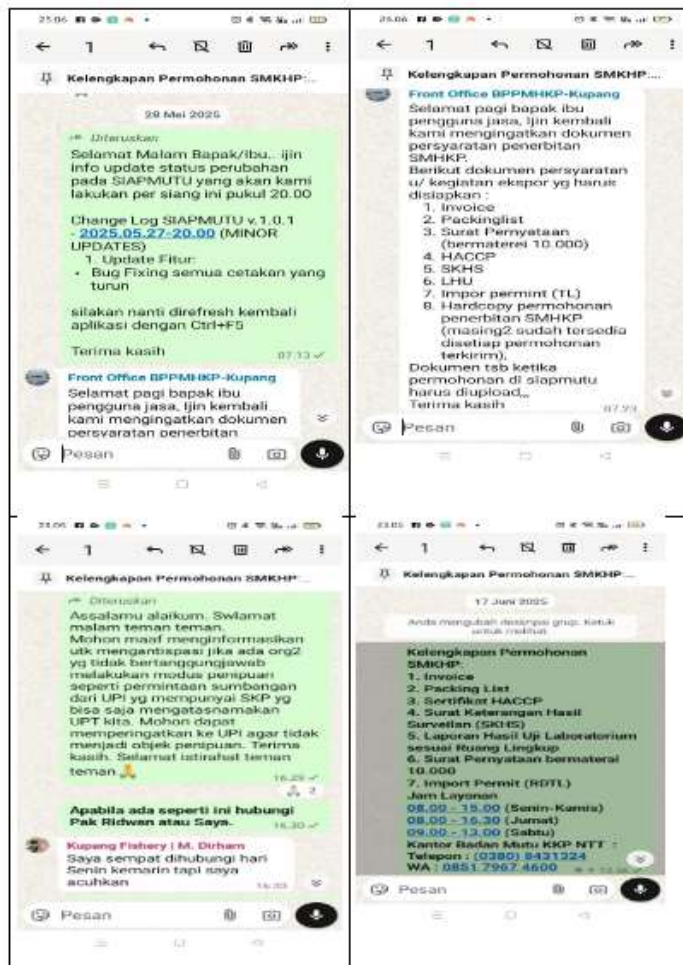
Pada 26-28 Mei 2025 Stasiun KIPM Kupang bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melakukan bimtek terkait Identifikasi Pengenalan Jenis Ikan Kakap, Kerapu, Tuna dan Ikan Pelagis lainnya di Resto Celebes Sosialisasi dihadiri oleh Tim Inspektur Mutu SKIPM Kupang dan Para Pelaku Usaha Ekspor Hasil Perikanan Poltek KP Kupang, BKKPN Kupang, Stasiun PSDKP Kupang, Wilker PRL Kupang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Total Jumlah Peserta 50 Orang.



LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG TRIWULAN II TA. 2025

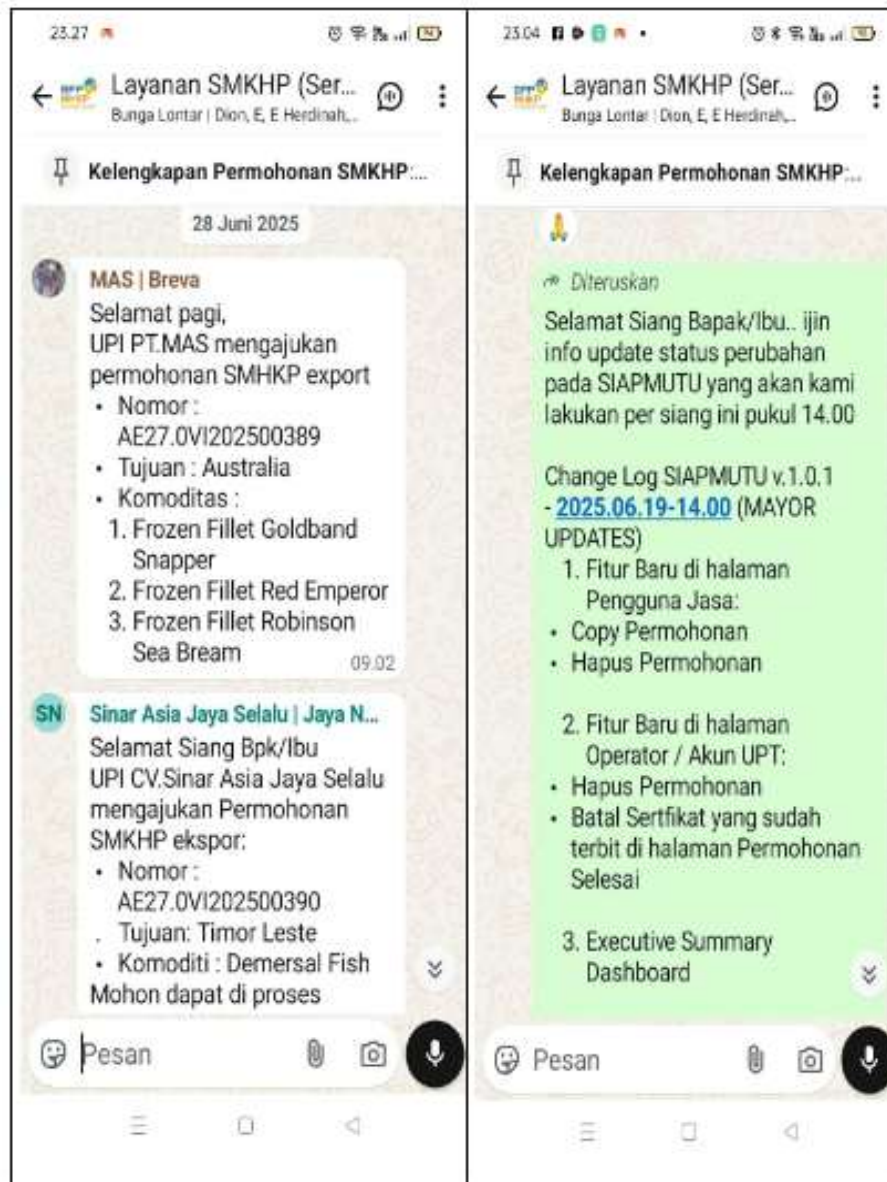


❖ Verifikator SMKHP UPT / Inspektur Mutu melakukan koordinasi terkait aplikasi Siapmutu SMKHP dengan Administrator SMKHP Badan PPMHKP melalui Whats up group *SiapMutu SMKHP*.



LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG TRIWULAN II TA. 2025

- Melakukan komunikasi dengan antara petugas Verifikasi permohonan SMKHP dengan Pengguna Jasa / Pelaku Usaha melalui whats up group **Layanan SMKHP (Sertifikat Mutu Service = SMS)** terkait permohonan, sertifikasi SMKHP dan permasalahan dalam aplikasi SiapMutu SMKHP.



Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Melakukan Koordinasi dengan Tim Verifikator SMKHP lingkup Stasiun KIPM Kupang	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Administrator Pusat terkait aplikasi Siapmutu SMKHP	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025
Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi SMKHP	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025



S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025. Sasaran kegiatan 2 lingkup Stasiun KIPM Kupang Triwulan II tahun 2025 belum memiliki nilai capaian karena capaiannya dilakukan secara tahunan. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten dan sesuai standar yaitu :

1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Kupang
2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kupang

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029
		Realisasi Triwulan II	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%	Target
S02. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar						
IKS 02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	70
IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	70

IKS.02.1. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025:2017 serta dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu



diperbaiki. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. Perhitungan capaian indikator kinerja nilai kualitas sistem manajemen mutu

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan secara tahunan.

IKS.02.2.Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap Lembaga inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020:2012 dan dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perhitungan capaian indikator Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan secara tahunan.

S.03. Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincak dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincak dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kupang tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian pada triwulan II untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincak dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang



**LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN II TA. 2025**



2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang
3. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024	Tahun 2025			Renstra 2025 - 2029
		Realisasi Triwulan II	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%	Target
S03. Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincih dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						
IKS 03.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	96,90	85	99,78	117,39	85
IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	71.50
IKS.03.3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	100
IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	82,94	75	86	114,67	75
IKS.03.5	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	85
IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	80	85	100	117,65	85
IKS.03.7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	76	100	120,00	76
IKS.03.8	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	-	-	-	-	70
IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang	95,68	88	94,56	107,45	88

IKS.03.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi



pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Pencapaian nilai IKPA berdasarkan ketaatan pada 8 indikator yaitu revisi DIPA, Deviasi RPD, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian output.

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
2. Deviasi RPD, merujuk pada perbedaan antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi penarikan dana yang sebenarnya.
3. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
4. Belanja kontraktual, digunakan sebagai tolak ukur dalam ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi belanja kontraktual. Perhitungannya berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja komponen ketepatan waktu (bobot 40 %), akselerasi kontrak dini (bobot 30 %) dan akselerasi belanja modal (bobot 30 %)
5. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPMLS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkalkali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan(TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor.
7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
8. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran.



LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG TRIWULAN II TA. 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I KUPANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.26	100.00	79.83	80%	0.00	99.78
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.13				100.00				

Capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Kupang pada periode Triwulan II tahun 2025 adalah 99,78 % dari target sebesar 85%, yang dapat dilihat melalui website <https://spanint.kemenkeu.go.id/>.

Capaian ini lebih tinggi daripada capaian Nilai IKPA Triwulan II Tahun 2024 sebesar 96,90%.

IKS.03.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Perhitungan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.



IKS.03.3 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian / lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu :

SKALA	OPINI
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar Dengan Pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Keterangan: Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya

Perhitungan capaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKS.03.4 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.



LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG TRIWULAN II TA. 2025



Gambar 3. Tangkapan Layar Indeks Profesionalitas ASN Pada Website ropeg.kkp.go.id

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Stasiun KIPM Kupang sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebesar 86 atau dengan persentase sebesar 114,67 % dari target yang ditetapkan untuk semester 1 yaitu 75. Dibandingkan capaian Triwulan II tahun 2024 dengan nilai 82.94, capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balikpapan periode Triwulan II tahun 2025 memiliki capaian yang lebih tinggi.

IKS.03.5 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan: Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi: PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ / LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ / LCK TW III
2. Aspek kesesuaian: Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
3. Aspek ketercapaian: Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaaku

Perhitungan capaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang dilakukan tahunan, sehingga pada Triwulan II Tahun 2025 belum memiliki nilai capaian.

IKS.03.6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

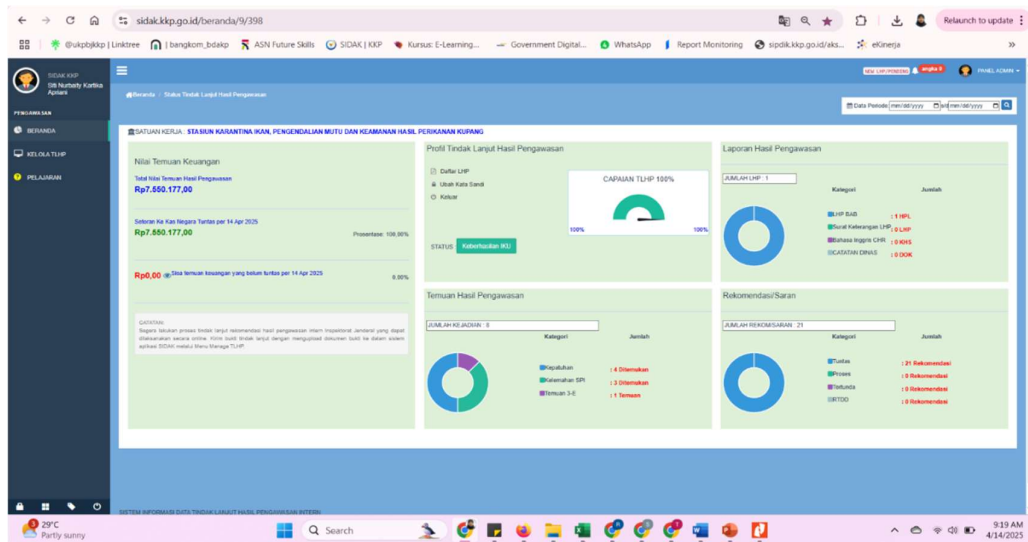
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Stasiun KIPM Kupang yang sudah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target kumulatif tahunan sebesar 85% pada tahun 2025. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Stasiun KIPM Kupang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Satker yang menjadi objek pengawasan. Pengecualian apabila tidak terdapat temuan dari Inspektorat Jenderal Mitra, maka capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II sesuai dengan capture dashboard pada Aplikasi SIDAK.



LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM KUPANG TRIWULAN II TA. 2025



Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Stasiun KIPM Kupang pada periode Triwulan II tahun 2025 adalah 100 % dari target sebesar 85%, yang diperoleh dari *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK KKP.



Gambar 4. *Dashboard* SIDAK KKP Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025

IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.



Target yang ditetapkan untuk capaian indikator kinerja persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Kupang adalah 76%. Sedangkan pengukuran capaiannya dilakukan setiap triwulan. Capaian indikator ini pada triwulan II tahun 2025 sebesar 100% berdasarkan penyampaian Nota Dinas dari Sekretariat Jendral KKP Nomor 86/SJ.7/TU.410/VII/2025 tanggal 09 Juli 2025.

IKS.03.8 Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan unit kerja dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai pembangunan integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona integritas (bobot 30 %)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15 %)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15 %)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15 %)
- e. Pelaporan harta kekayaan (LHKAN) (bobot 15 %)
- f. Pengendalian kecurangan (bobot 10%)

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025 dilakukan tahunan.

IKS.03.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Kupang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat:



<https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari UPT lingkup BKIPM.

Cara Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
IKM unit pelayanan x 25

Pada Triwulan II Tahun 2025, nilai-nilai unsur pelayanan yang diperoleh SKIPM Kupang dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Grafik Nilai SKM Per Unsur



Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,80	3,80	3,79	3,74	3,79	3,78	3,78	3,80	3,77
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	94,56 (A atau Sangat Baik)								

Perhitungan:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang =

$$\frac{3,80+3,80+3,79+3,74+3,79+3,78+3,78+3,80+3,77}{9} = 3,78$$

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi
= 3,78x 25 = 94,56

Dari data tersebut diatas yang diberikan oleh 56 responden yang telah memberikan pendapatnya terhadap 9 (sembilan) unsur yang menjadi objek Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan II Tahun 2025, nilai persepsinya diatas angka 3 (tiga). Hal ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan oleh Stasiun KIPM Kupang secara umum telah mencerminkan tingkat pelayanan yang baik. Berdasarkan cara pengukurannya, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada angka 94,56% maka dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Stasiun KIPM Kupang adalah "SANGAT BAIK".

3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Kupang pada TA. 2025 adalah sebesar Rp. 4,422,198,000,-. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 1,599,753,118,- atau sebesar 36,18% dari PAGU yang tersedia. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kupang Triwulan II Tahun 2025 Berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 7 dan 8.



Tabel 7. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3.998.198,000	1.581.926.118	39,57
2	3989 Pengendalian Mutu	255.000.000	8.132.500	3,19
3	7010 Manajemen Mutu	169.000.000	9.694.500	5,74
	TOTAL	4.422.198.000	1.599.753.118	36,18

Tabel 8. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	%
1	Pegawai	2.147.788,000	1.014.264.488	47,22
2	Barang	2.274.410.000	585.488.630	14,73
3	Modal	0	0	0
	TOTAL	4.422.198,000	1.599.753.118	36,18

Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,96 %, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Stasiun KIPM Kupang telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas.. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Stasiun KIPM Kupang untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas



Kinerja. Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan II tahun 2025, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Triwulan II Tahun 2025 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025.
2. Sebanyak Sembilan (9) kegiatan yang merupakan target pada Triwulan II memiliki capaian melebihi target, dengan dukungan anggaran yang tersedia.
3. Capaian realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan OMSPAN adalah Rp1.599.753.118,- atau sebesar 36,18% dari pagu anggaran Rp4,422,198,000,-.



BAB III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Stasiun KIPM Kupang pada periode sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM Kupang pada periode Triwulan II tahun 2025 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025, terdapat 9 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target dan 6 Indikator Kinerja yang belum memiliki realisasi pada Triwulan II, karena target pencapaian dilakukan per semester atau tahunan. Nilai capaian Kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 112,96% (Kategori Istimewa).

3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II tahun 2025 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi triwulan sebelumnya sebagai dasar pemenuhan target triwulan berikutnya. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan pemenuhan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
2. Melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan terstruktur agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
4. Laporan pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar perencanaan kinerja triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja berorientasi hasil yang lebih optimal.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN KUPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN KUPANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Lokasi)	1
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75
		6.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	85
		13.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	76
		14.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.998.198.000,-
2.	Manajemen Mutu	169.000.000,-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	255.000.000,-
Total Anggaran Stasiun KIPM Kupang Tahun 2025		4.422.198.000,-

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG TRIWULAN II TAHUN 2025

Nama Indikator : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nama Timja : Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Periode Pelaporan : Triwulan II Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	0	70	70	-	-	-	-	-	-
Realisasi	0	100	100	-	-	-	-	-	-
% Capaian	0	120	120	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- BPPMHKP Kupang saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Pada Triwulan II tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :
 - a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Pada Triwulan II, terdapat satu Kapal penangkapan ikan yang melakukan permohonan sertifikasi CPIB Kapal, dan sudah dilakukan inspeksi oleh Inspektur Mutu BPPMHKP Kupang sampai terbit satu sertifikat CPIB Kapal atas nama KM. Tribun Timur 11. Selain itu, terdapat beberapa kapal yang telah berkoordinasi untuk melakukan proses permohonan termasuk beberapa kapal di Larantuka dan di Maumere, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Atas Kapal

$$\text{Pengukuran} = \frac{1 \text{ Sertifikat CPIB Kapal}}{1 \text{ Permohonan CPIB Kapal}} \times 100\% = 100\%$$

- Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol,

melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan sertifikasi pada triwulan II masih nihil, dimana pada saat ini para pembudidaya masih terkendala untuk melengkapi persyaratan logam berat yang belum bisa dilakukan uji di Nusa Tenggara Timur. Sehingga membutuhkan waktu untuk pengujian parameter logam berat dari proses pengiriman sampel sampai diterimanya hasil uji.

Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

$$\text{Pengukuran} = \frac{0 \text{ Sertifikasi CPIB Pembenihan}}{0 \text{ Permohonan CPIB yang memenuhi persyaratan}} \times 100\% = 0$$

- Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. sertifikasi pada triwulan II masih nihil, namun sudah ada informasi 1 permohonan di OSS, atas nama Natalia Lerick yang berlokasi di Kota Kupang.

Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

$$\text{Pengukuran} = \frac{0 \text{ Rekomendasi CBIB}}{0 \text{ Permohonan CBIB yang memenuhi persyaratan}} \times 100\% = 0$$

- Indikator Kinerja tahun 2025 ini merupakan indikator kinerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024, namun dengan trend yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, dimana pada per triwulan I dan II, kegiatan sertifikasi sama-sama masih dengan capaian target yang rendah, namun akan meningkat dengan signifikan pada periode Triwulan berikutnya.
- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.000.000, yang belum direalisasikan pada tahun 2025, dan akan mulai dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2025.:
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB Kapal, CPIB dan CBIB pada TW II sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 Inspektur 1 auditor CPIB/CBIB, dan didukung oleh Perwakilan 2 orang penyuluh perikanan BRSDMKP.

Akar Masalah

- Sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPIB Kapal perikanan
- UUPI baik itu budidaya maupun pelaku pembenihan mempunyai kendala dalam melakukan permohonan ke OSS, dikarenakan kendala SDM, Dan pada saat ini para pembudidaya masih terkendala untuk melengkapi persyaratan logam berat yang belum bisa dilakukan uji di Nusa Tenggara Timur, sehingga membutuhkan waktu

untuk pengujian parameter logam berat dari proses pengiriman sampel sampai diterimanya hasil uji.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Program percepatan dilakukan di BPPMHKP Kupang dengan mendata keberadaan dan kesiapan persyaratan kapal yang dilakukan secara realtime. Termasuk adanya kendala tidak adanya sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal yang ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh PPN Pengembangan.
2. Inspektur Mutu BPMHKP Kupang melakukan bimbingan dan pendampingan langsung kepada pembudidaya yang akan melakukan permohonan sertifikasi, dengan turun langsung ke unit budidaya/pembenihan untuk melakukan bimbingan dan pendampingan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan para pengguna jasa, stakeholders terkait, dan instansi terkait melalui grup WAG untuk mengumpulkan informasi, permasalahan, dan solusi dalam proses sertifikasi tersebut.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan koordinasi dengan DJPT, DJPB, dan BRSDM terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis BPMHKP Kupang melakukan bimbingan dan pendampingan langsung kepada pembudidaya yang akan melakukan permohonan sertifikasi	Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q3 Tahun 2025

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang



Ridwan, S.St.Pi

Kupang, 30 Juni 2025
Ketua Tim Pengawasan Mutu



Heri Kurniawan, S.St.Pi, M.P

BPMHKP Kupang melakukan bimbingan dan pendampingan langsung kepada pada pembudidaya yang akan melakukan permohonan sertifikasi.

2 Juni 2025





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 53 - 250249

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> <i>Fishing Vessel</i>	: KM. TRIBUN TIMUR 11
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: Baringeng, RT.002/RW.001, Desa Baringeng, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai
<u>Ukuran Kapal</u> <i>Size of fishing vessel</i>	: 24 GT
<u>Tipe Kapal</u> <i>Type of fishing vessel</i>	: <u>Kapal Penangkap</u> <i>Fishing Vessel</i>
<u>Tanggal Inspeksi</u> <i>Inspection date</i>	: <u>10 Juni 2025</u> <i>10 June 2025</i>
<u>Jenis Produk</u> <i>Commodity</i>	: <u>Tuna Segar, Ikan Segar</u> <i>Fresh Tuna, Fresh Fish</i>
<u>Pemeringkatan</u> <i>Grade</i>	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

<u>Dikeluarkan di</u> <i>Issued in</i>	: Jakarta
<u>Pada tanggal</u> <i>Date</i>	: <u>17 Juni 2025</u> <i>17 June 2025</i>
<u>Berlaku sampai</u> <i>Valid until</i>	: <u>17 Juni 2027</u> <i>17 June 2027</i>

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG

Nama Indikator : Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Kupang

Nama Timja : Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Periode Pelaporan : Triwulan II Tahun 2025

NAMA SASARAN STRATEGIS	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan
NAMA IK	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN						Capaian TAHUN 2025
	Q1	Q2	SM.I	Q3	Q4	SM.II	
Target	70	70	70	0	0	0	0
Realisasi	100	94,12	97,06	0	0	0	0
% Capaian	142,86	134,46	138,66	0	0	0	0

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1,2,3,4

SM.I = Capaian Semester \

SM.II = Capaian Semester II

Tahunan = Capaian Akhir Tahun

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

- ❖ Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- ❖ Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan / budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi pasca panen
- ❖ Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- ❖ Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen terdiri dari :
 - a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier / Sertifikat Distribusi Ikan yang Baik (SPDI);
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);

c. Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

❖ Pada Triwulan II tahun 2025 SKIPM Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi antara lain:

- a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- b. Sertifikat HACCP
- c. Surat Keterangan Penerapan HACCP di Supplier;

❖ **Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP** adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain :

1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
2. Unit penanganan ikan hidup;
3. Unit penanganan rumput laut kering;
4. Gudang beku;
5. Gudang dingin;
6. Gudang kering, dan/atau
7. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) / Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

❖ **Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point** yang selanjutnya disebut **Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP** adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Penerapan PMMT/ HACCP melalui HACCP Online System (HONEST) dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha dari OSS;
2. Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar) dari OSS;
3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari BPPMHKP;
4. Rancangan Panduan Mutu Penerapan HACCP tervalidasi;
5. Rekaman Audit Internal

❖ Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 14 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 13 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya dibawah tanggung jawab Kementerian

Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.

- ❖ Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP.
- ❖ Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS.
- ❖ Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS.
- ❖ Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi diupload pada SKP online

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target (jika tidak tercapai Akar Masalah, Mengapa hal tersebut terjadi?)

1. Capaian indikator SKP di tingkat UPT diperoleh dari perbandingan jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang terbit dengan total seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan diupload pada SKP Online Per Triwulan. Pada triwulan 2 tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang melakukan pemeriksaan/verifikasi permohonan sertifikasi SKP sebanyak 17 permohonan dan telah terbit Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebanyak 15 ruang lingkup sehingga target tercapai **84,12%**.
2. Capaian indikator HACCP diperoleh dari perbandingan Jumlah sertifikat HACCP yang terbit dengan jumlah permohonan (ruang lingkup) yang diterbitkan BPPMHKP dan diupload pada honest (haccp online system) per triwulan. Pada triwulan 2 tahun 2025 Stasiun KIPM Kupang terdapat 1 (Satu) permohonan Sertifikasi HACCP (perpanjangan) dan telah dilakukan inspeksi dan terbit 1 Sertifikat HACCP ruang lingkup Dried Seaweed dari 1 Unit Pengolahan Rumput Laut.
3. Capaian Indikator Produksi Pasca Panen diperoleh dari Realisasi Capaian IK Lingkup Pasca Panen dibandingkan dengan Jumlah Sertifikasi lingkup Pasca Panen dalam 1 triwulan.

$$X = \frac{A + B}{Xn}$$

X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikasi SKP

B = Persentase Penerbitan Sertifikasi HACCP

Xn = Jumlah Unsur Pembentuk

$$X \% = \frac{88,24 + 100}{2} = \frac{188,24}{2} = 94,12 \quad X = 94,12 \%$$

- ❖ Berdasarkan perhitungan rumusan diatas capaian Indikator Produksi Pasca Panen Lingkup Stasiun KIPM Kupang sebesar **134,46 %** dan melebihi target semula **70%** dan realisasi sebesar **94,12 %**
- ❖ Output dari kegiatan Sertifikasi Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang triwulan yaitu :
 - a. 15 Sertifikat SKP dari 17 rekomendasi dari 4 Unit Usaha Pengolahan Ikan dengan ruang lingkup produk (terlampir)
 - b. 1 Sertifikat HACCP di sebanyak 1 UPRL dengan ruang lingkup produk Dried Seaweed.

❖ Ruang Lingkup Sertifikasi SKP Triwulan II Tahun 2025

No.	Unit Pengolahan Ikan	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal Terbit
1.	CV. Sinar Asia Jaya Selalu	Demersal Segar	B	202504091240002479783/ NO: 150723018512300000001
2.	CV. Sinar Asia Jaya Selalu	Tuna Segar	B	202504091516308242364/ NO: 150723018512300000004
3.	CV. Sinar Asia Jaya Selalu	Pelagic Segar	B	202504091509489713175/ NO: 150723018512300000003
4.	PT. Ching Hwa Indonesia	Pelagic Beku	B	202502261631212001155/ NO: 812001011157400090003
5.	PT. Ching Hwa Indonesia	Demersal Beku	B	202502171350076127729/ NO: 812001011157400080001
6.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Tuna Steak Beku	A	202503200919049719684/ NO: 02201061128770001000
7.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Fillet Demersal Segar	A	202503201028298356668/ NO: 022010611287700020006
8.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Fresh Demersal Tanpa Kepala Buang Isi	A	202503201025047936722/ NO: 022010611287700020005
9.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Tuna Steak Segar	A	202503201013067939687/ NO: 022010611287700020004
10.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Tuna Loin Segar	A	202503201017472564689/ NO: 022010611287700020003
11.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Demersal Segar	A	202503201021047865548/ NO: 022010611287700020002
12.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Tuna Saku Beku	A	202503200939546285188/ NO: 022010611287700010006
13.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Tuna Loin Beku	A	202503200948342312920/ NO: 022010611287700010005
14.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Demersal Utuh Beku	A	202503200953453683113/ NO: 022010611287700010004
15.	PT. Damena Sumber Rejeki Kupang	Fillet Demersal Beku	A	202503201007556855306/ NO: 022010611287700010003

❖ Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP di Unit Pengolahan Ikan Triwulan II Tahun 2025

No.	Unit Pengolahan Ikan / Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal
1.	CV. Agar Kembang	Dried Seaweed	B	001-HACCP-SPL/27/VI/2025 30 Juni 2025

❖ Ruang Lingkup Surat Keterangan Penerapan HACCP di Supplier Triwulan II Tahun 2025

No.	Unit Pengolahan Ikan / Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal
1.	CV. Giovanni Sukses Mandiri	Frozen Tuna (Whole)	Cukup	001-HACCP-SPL/27/VI/2025 30 Juni 2025

❖ Untuk mendukung kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp.100.000.000,- dengan rician sebagai berikut :

1. Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan Rp.30.000.000,-
2. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) pada Unit Pengolahan Ikan Skala UMKM dan Menengah Besar Rp. 35.000.000,-
3. Sertifikasi Penerapan PMMT/HACCP Ruang Lingkup Produk pada Unit Pengolahan Ikan Rp. 35.000.000,

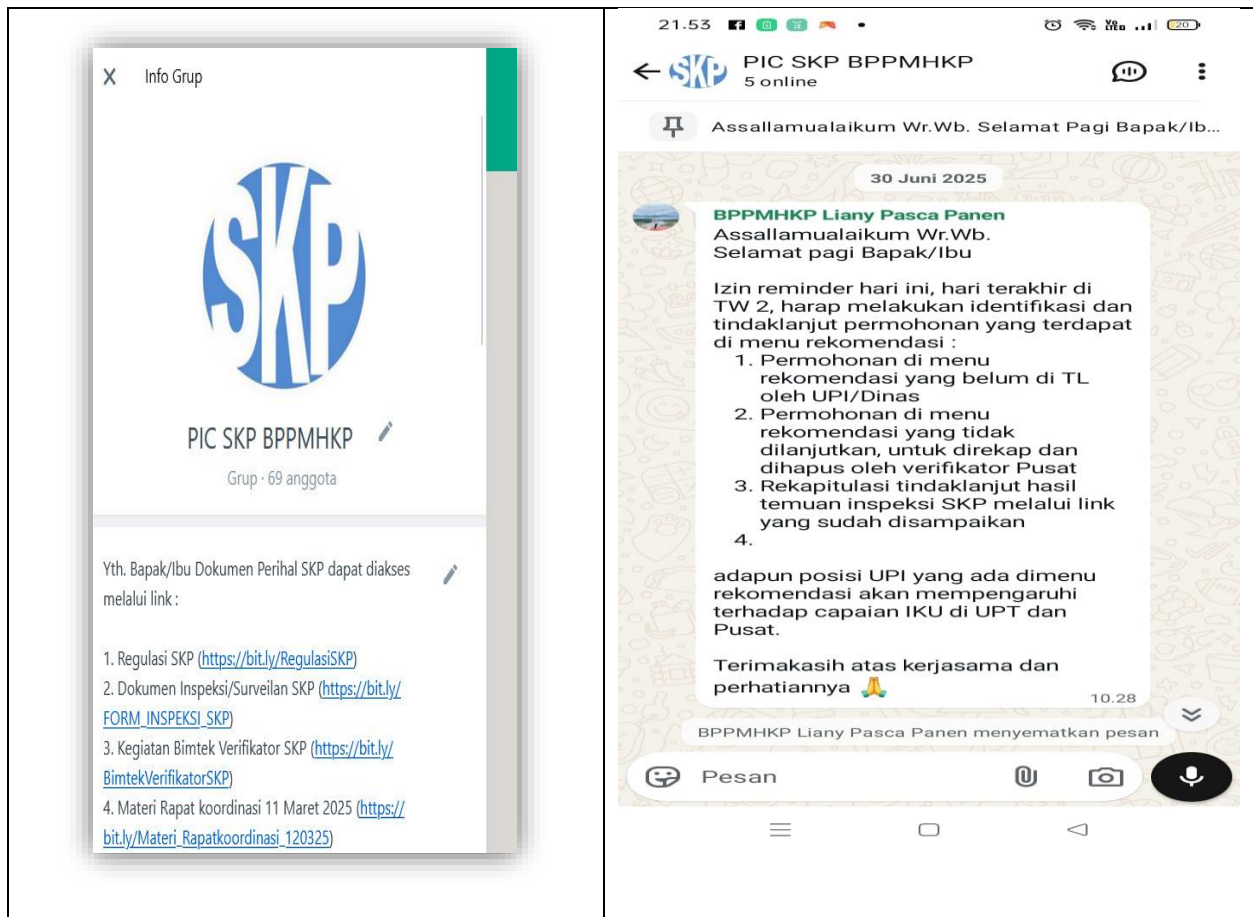
- ❖ Realisasi Anggaran pada kegiatan Produksi Pasca Panen pada triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran sebesar Rp.100.000.000,-

No.	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Sertifikasi SPDI	30.000.000	-	30.000.000
2.	Sertifikasi SKP	35.000.000	600.000	34.600.000
3.	Sertifikasi PMMT / HACCP	35.000.000	-	31.667.500
	Jumlah	100.000.000	3.932.500	68.332.500

- ❖ Jumlah sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan verifikasi SKP dan Inpeksi Penerapan Manajemen Mutu Terpadu / HACCP adalah sebanyak 6 orang Inspektur Mutu dari Stasiun KIPM Kupang.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- ❖ Melakukan komunikasi a n t a r a petugas pemeriksa permohonan SKP UPT dengan Verifikator Pusat melalui *whats up group PIC SKP BPPMHKP* untuk mengingatkan dalam melakukan pemeriksaan sesuai norma waktu yang ditetapkan.



- ❖ Melakukan komunikasi dengan Pelaku Usaha dengan Inspektur Mutu UPT dalam *whats up group HACCP UPI NTT* untuk penerapan HACCP dan perpanjangan Sertifikat HACCP.

21.54

←

HACCP UPI NTT

Grup · 48 anggota

Chat audio

Tambah

Cari

Informasi Inspeksi, Monev, Surveilans HACCP, Traceability dan Pengambilan Contoh
link honest : haccp.kkp.go.id
Dibuat oleh Anda, 07/01/24

Media, tautan, dan dok 63 >

Notifikasi
Semua

Visibilitas media

21.53

←

HACCP UPI NTT

3 online

30 Juni 2025

E Umita im³

Selamat sore bapak/ibu penanggung jawab UPI,,
Berikut terlampir surat pemberitahuan pelaksanaan Official Control (Surveilans dan pengambilan contoh) di bulan Juli 2025.
Untuk nama-nama UPI terlampir dimohon segera menginformasikan tanggal kesediaan bahan baku untuk proses produksi, agar dapat diatur jadwal pelaksanaan Surveilannya (diinfokan langsung di grup ini). Terima kasih

NB: mohon dicermati juga point a-d, hal yang harus disiapkan saat pelaksanaan surveilans

16.20

E Umita im³

Surat Pemberitahuan Surveilans Juli.pdf

2 halaman · 441 kB · PDF

16.21

Pesan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Melakukan Koordinasi dengan Bidang Pembinaan Mutu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi / Kota / Kabupaten terkait SKP	Timja Pengendalian dan Penawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Verifikator Pusat terkait sertifikasi SKP	Timja Pengendalian dan Penawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025
Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi Produksi Pasca Panen (SKP, SPDI, HACCP)	Timja Pengendalian dan Penawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Tim Pasca Panen BPPMHKP terkait refreshment / bimtek HACCP, SKP, SPDI / SK HACCP Supplier untuk Inspektur Mutu	Timja Pengendalian dan Penawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang



Ridwan, S.St.Pi

Kupang, 7 Juli 2025
Ketua Tim Pengendalian Mutu

Prinstony S. Bella, A.Pi

Lampiran 1.

**TABEL CAPAIAN KINERJA SERTIFIKASI SERTIFIKAT KELAYAKAN
PENGOLAHAN DI UNIT PENGOLAHAN IKAN**

TRIWULAN II 2025

No	Nama Satker	Target (%)	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Sertifikat	%
1.	Stasiun KIPM Kupang	70	17	15	88,24

**TABEL CAPAIAN KINERJA SERTIFIKASI PENERAPAN HACCP
DI UNIT PENGOLAHAN IKAN**

TRIWULAN II 2025

No	Nama Satker	Target (%)	Jumlah Permohonan	Jumlah Sertifikat HACCP	%
1.	Stasiun KIPM Kupang	70	1	1	100

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG TRIWULAN II TAHUN 2025

Nama Indikator : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

Nama Timja : Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Periode Pelaporan : Triwulan II Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	0	1	1	-	-	-	-	-	-
Realisasi	0	1	1	-	-	-	-	-	-
% Capaian	0	100	100	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, *Supplier*, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan.

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Semester 1 Tahun 2025 ini sudah dilaksanakan pada 1 Lokasi yaitu Kota Kupang dengan Lokus Pasar tradisional yaitu Pasar Inpres dan Pasar Oeba. Oleh karena itu, capaian kinerja Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun

KIPM Kupang pada Semester 1 Tahun 2025 ini yaitu 1 lokasi dari target pada Triwulan II atau semester 1 yaitu 1 lokasi sehingga realisasi adalah 100%.

Tindakan yang telah dilaksanakan

A. Penilaian sarana dan prasarana

Perhitungan bobot penilaian sarana prasarana dengan rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria	Nilai	Kriteria ditemukan
Sangat Baik	100	0
Baik	75	0
Cukup	50	0
Kurang	30	2
Total		2

Maka perhitungan yang dilakukan adalah penjumlahan dari kriteria baik sekali, kriteria baik, kriteria cukup dan kriteria buruk

$$\frac{0 \times 100}{2} + \frac{0 \times 50}{2} + \frac{2 \times 30}{2} = 30.00$$

B. Penilaian pengujian produk

Penilaian bobot pengujian produk dilakukan berdasarkan nilai/skor parameter hasil uji yang terdiri dari minimum 5 parameter yakni organoleptik, bakteri ALT, E. coli, bakteri Salmonella dan Formalin. Kriteria dari 5 parameter tersebut sebagai berikut :

$$\text{Rata - rata} = 1/n \sum_{(i=1)}^n \bar{Y}_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey ditemukan nilai organoleptik dari produk. Maka rata-rata didapatkan dengan :

$$(01 + 02 + 03 + 0n) / n = \dots \times 10 = \dots$$

$$(8,0+8,0+8,0+8,0+7,0+8,0+8,0+8,0+7,0+8,0+8,0)/11 = 7,867 \times 10 = \mathbf{78,73}$$

Perhitungan kriteria ALT, bakteri E.coli, Salmonella, Formalin dan Histamin rumus :

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan :

Kriteria ALT	Kriteria ditemukan	Kriteria E.coli	Kriteria ditemukan	Kriteria Salmonella	Kriteria ditemukan	Kriteria Formalin	Kriteria ditemukan	Kriteria Histamin	Kriteria ditemukan	Nilai/skor
$>5 \times 10^5$	2	>3	7	Positif	0	Negatif	0	>100 mg/kg	0	10
$<5 \times 10^5$	9	<3	4	Negatif	11	Negatif	11	<100 mg/kg	2	100

Perhitungan ALT dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria $>5 \times 10^5$ dan $<5 \times 10^5$

$$\frac{2 \times 10}{11} + \frac{9 \times 100}{11} = 83,64$$

Perhitungan bakteri E.coli dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >3 dan <3

$$\frac{7 \times 10}{11} + \frac{4 \times 100}{11} = 42,73$$

Perhitungan bakteri Salmonella dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{11} + \frac{11 \times 100}{11} = 100$$

Perhitungan Formalin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{11} + \frac{11 \times 100}{11} = 100$$

Perhitungan Histamin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >100 mg/kg dan <100 mg/kg

$$\frac{0 \times 10}{2} + \frac{2 \times 100}{2} = 100$$

Penilaian rata-rata dari pengujian produk didapatkan dengan rumus rata-rata

$$rata - rata = 1/n \sum_{(i=1)}^n Y_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai organoleptik dari produk = **78,73**
2. Nilai kriteria bakteri ALT = 83,64
3. Nilai kriteria bakteri E.coli = 42,73
4. Nilai kriteria bakteri Salmonella = **100**
5. Nilai kriteria Formalin = **100**
6. Nilai kriteria Histamin = **100**

Maka rata-rata nilai pengujian produk didapatkan dengan

$$\frac{78,73 + 83,64 + 42,73 + 100 + 100 + 100}{6} = 84,18$$

C. Penilaian jaminan mutu

$$\text{Jaminan mutu} = (60\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai sarana prasarana = **30,00**
2. Nilai pengujian produk = **84,18**

$$(60\% \times 30) + (40\% \times 84,18) = \mathbf{61,58\%}$$

Secara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu keamanan produk perikanan di Kota Kupang pada semester I (satu) Tahun 2025 : **51,60%** dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan **38,42%** dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan.



Mengetahui
Kepala Stasiun KIPM Kupang

Ridwan, S.St.Pi

Kupang, 30 Juni 2025
Ketua Tim Pengawasan Mutu

A handwritten signature in black ink, belonging to Heri Kurniawan, is written over the text.

Heri Kurniawan, S.St.Pi, M.P

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG

Nama Indikator : Rasio Ekspor Hasil Perikanan Yang diterima Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)

Nama Timja : Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan

Periode Pelaporan : Triwulan II Tahun 2025

NAMA SASARAN STRATEGIS	:	Program Nilai Tambah Daya Saing Ekspor
NAMA IK	:	Rasio Ekspor Hasil Perikanan Yang diterima Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang (%)

T/R	TAHUN						Capaian TAHUN 2025
	Q1	Q2	SM.I	Q3	Q4	SM.II	
Target	99	99	99	0	0	0	0
Realisasi	100	100	100	0	0	0	0
% Capaian	101,01	101,01	101,01	0	0	0	0

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1,2,3,4

SM.I = Capaian Semester I

SM.II = Capaian Semester II

Tahunan = Capaian Akhir Tahun

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

- ❖ Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari wilayah Republik Indonesia Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus dilengkapi SMKHP. Kewajiban melengkapi SMKHP sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk barang bawaan penumpang dan/atau pelintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ SMKHP dipersyaratkan untuk Hasil Perikanan yang dikeluarkan dari Negara Republik Indonesia untuk tujuan :
 - a. konsumsi; dan
 - b. nonkonsumsi.
- ❖ SMKHP untuk Hasil Perikanan konsumsi dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan:
 1. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CBIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu;
 2. berupa ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat CPIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan Pengawasan Mutu; atau
 3. berasal dari unit usaha yang memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu.
- ❖ SMKHP untuk Hasil Perikanan nonkonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diterbitkan dalam hal Hasil Perikanan berasal dari unit usaha yang memiliki SKP dan telah dilakukan Pengawasan Mutu
- ❖ Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan / budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan.
- ❖ Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi

sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

- ❖ **Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan** yang selanjutnya disingkat **SMKHP** adalah sertifikat untuk Pengeluaran dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Hasil Perikanan yang tercantum di dalamnya telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan.H)
- ❖ Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau SMHKP terdiri dari beberapa jenis / model dengan negara tujuan yang berbeda antara :
 - ❖ SMKHP untuk Non Negara Mitra (Model H); contoh : Singapura, Timor Leste, Australia dan Malaysia;
 - ❖ SMKHP untuk Negara Mitra (Model A,B,C,D,E,F dan G) merupakan jenis SMKHP yang telah disepakai oleh negara tujuan sesuai bentuk dan isinya; Contoh : USA, Uni Eropa, Inggris, China, Korea, Vietnam.
- ❖ Pada Triwulan II tahun 2025 SKIPM Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi SMHKP antara lain:
 - a. Sertifikat SMKHP ke Negara Non Mitra;

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target (jika tidak tercapai Akar Masalah, Mengapa hal tersebut terjadi?)

- ❖ Capaian Indikator Ekspor Hasil Perikanan Yang diterima Negara Tujuan Ekspor diperoleh dari Jumlah SMHKP yang diterbitkan UPT BPPMHKP dikurangi dengan Jumlah SMHKP yang ditolak negara tujuan dan diperbandingkan dengan jumlah SMKHP yang ditolak negara tujuan ekspor.

A - B

$$X = \frac{A - B}{A} \times 100 \%$$

X = Rasio Hasil Kelautan dan Perikanan yang Diterima Negara Tujuan Ekspor (%)
 A = SMKHP yang diterbitkan UPT BPPMHKP
 B = Jumlah SMKHP yang ditolak negara tujuan

$$X = \frac{265 - 0}{265} \times 100 \% = \frac{265}{265} \times 100\% = 100 \%$$

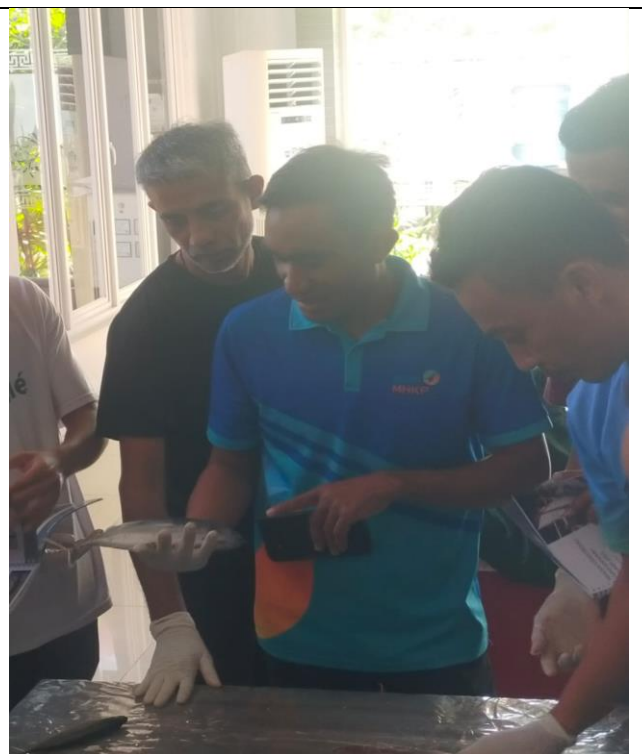
- ❖ Berdasarkan perhitungan rumusan diatas realisasi capaian Indikator Ekspor Hasil Perikanan yang diterima negara tujuan Lingkup Stasiun KIPM Kupang sebesar 100% dan melebihi target semula 99% karena tidak ada penolakan terhadap SMKHP atau Hasil Perikanan yang diekspor
- ❖ Output dari kegiatan Sertifikasi SMKHP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu :
 - a. 366 Sertifikat SMKHP Model H untuk negara Non Mitra yang mengirim ke negara Timor Leste, Singapura, Malaysia, Australia dan Chili berupa Ikan Demersal Segar, Ikan Pelagis Segar, Ikan Demersal Beku, Ikan Demersal segar, Ikan Kering dan Powder Rumpot Laut.
- ❖ Untuk mendukung kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan rician sebagai berikut :
 1. Evaluasi Penerbitan HC di UPI Rp.10.000.000,-
- ❖ Realisasi Anggaran pada kegiatan Evaluasi pernebitan HC (SMKHP) pada triwulan II tahun 2025 sebesar Rp.0,- atau 0% dari anggaran sebesar Rp.10.000.000,- hal ini dikarenakan adanya pemblokiran anggaran.

No.	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Evaluasi Penerbitan SMHKP	10.000.000	0	10.000.000
	Jumlah	10.000.000	0	10.000.000

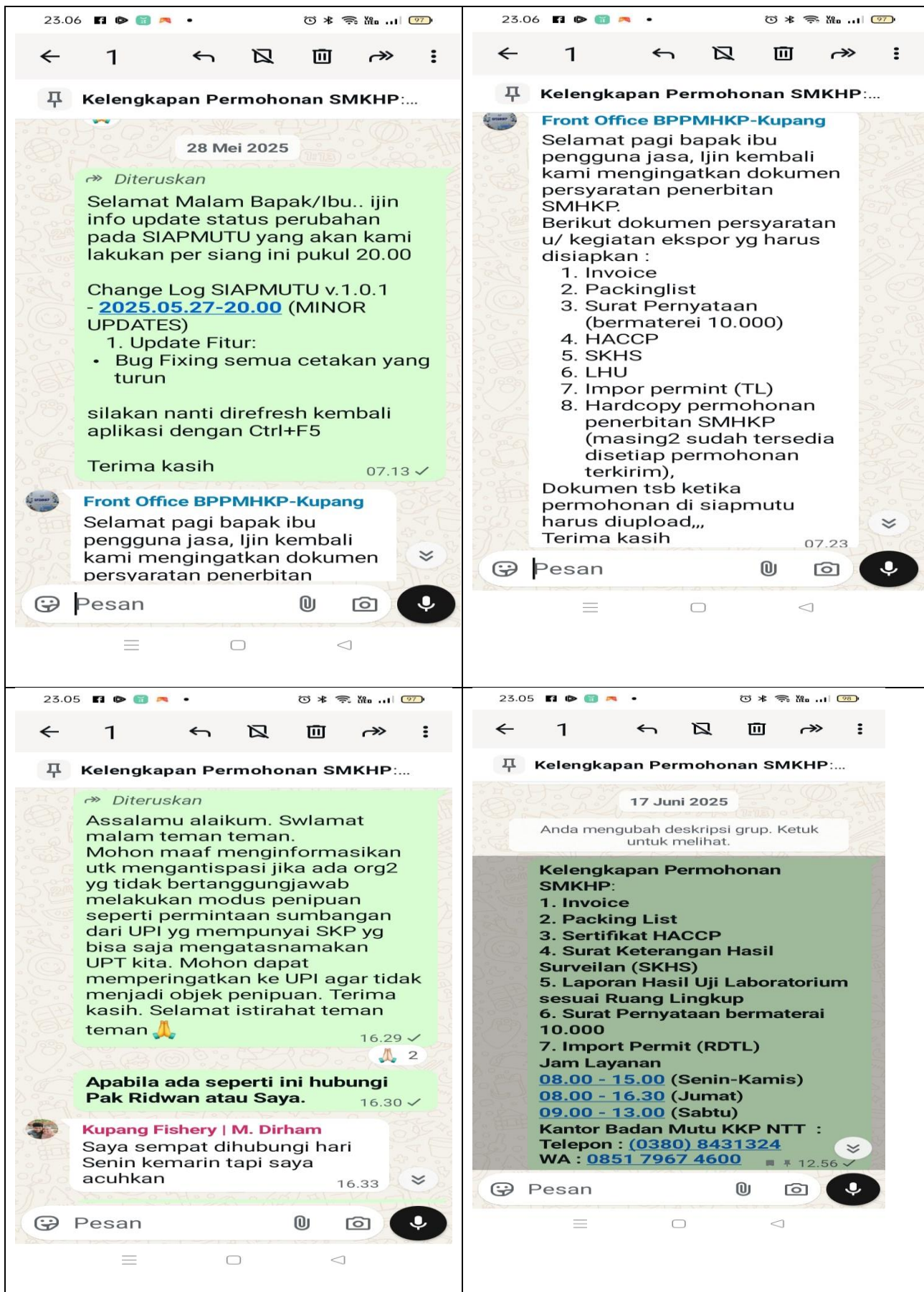
- ❖ Jumlah sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan Evaluasi Penerbitan SMKHP adalah sebanyak 6 orang Inspektur Mutu, 1 Orang Asisten Inpektur Mutu dan 4 orang tenaga administrasi perkantoran dari Stasiun KIPM Kupang.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

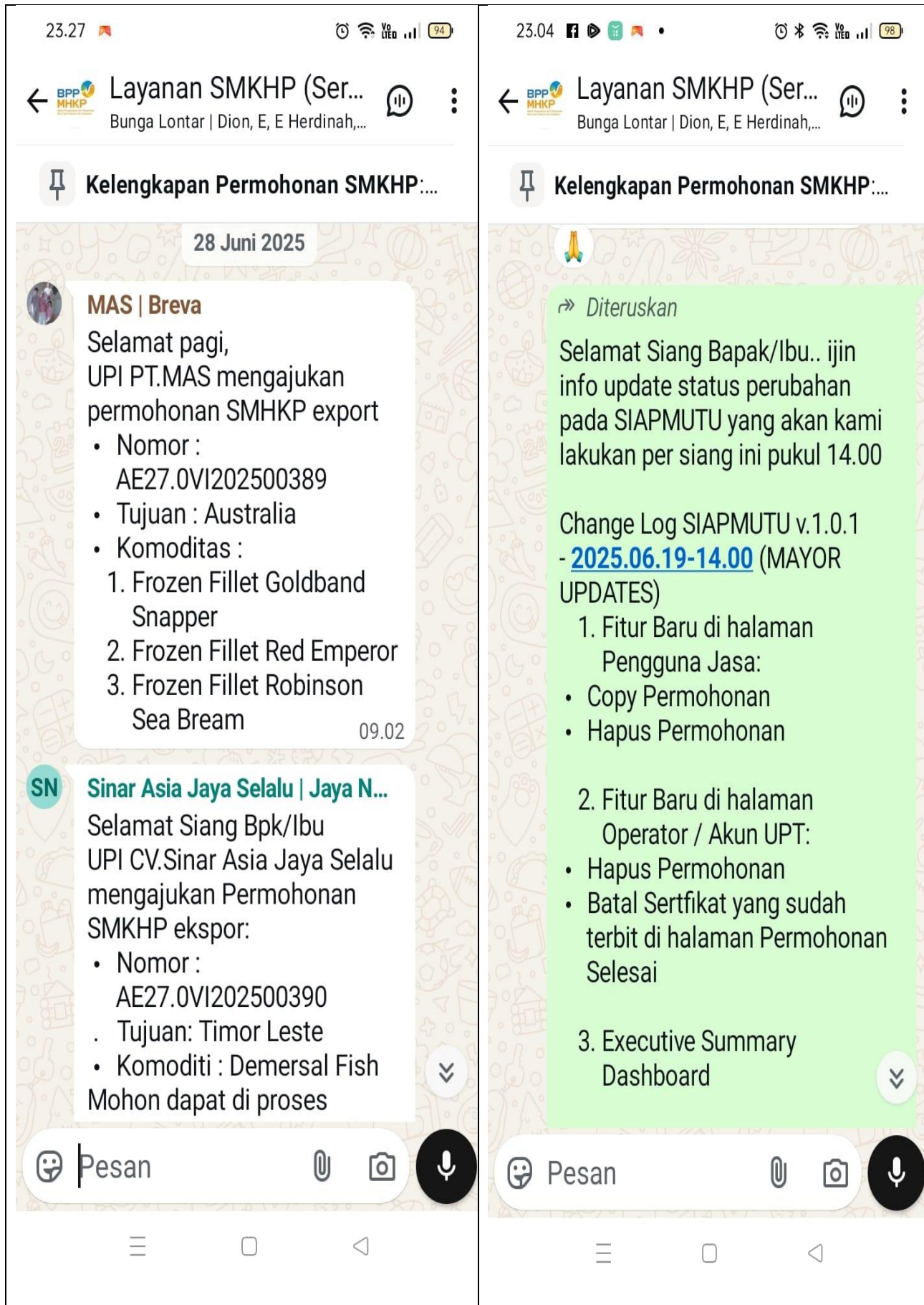
- ❖ Pada 26-28 Mei 2025 Stasiun KIPM Kupang bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melakukan bimtek terkait Identifikasi Pengenalan Jenis Ikan Kakap, Kerapu, Tuna dan Ikan Pelagis lainnya di Resto Celebes Sosialisasi dihadiri oleh Tim Inspektur Mutu SKIPM Kupang dan Para Pelaku Usaha Ekspor Hasil Perikanan Poltek KP Kupang, BKKPN Kupang, Stasiun PSDKP Kupang, Wilker PRL Kupang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Total Jumlah Peserta 50 Orang.



- ❖ Verifikator SMKHP UPT / Inspektur Mutu melakukan koordinasi terkait aplikasi Siapmutu SMKHP dengan Administrator SMKHP Badan PPMHKP melalui Whats up group **SiapMutu SMKHP**.



- ❖ Melakukan komunikasi dengan antara petugas Verifikasi permohonan SMKHP dengan Pengguna Jasa / Pelaku Usaha melalui *whats up group Layanan SMKHP (Sertifikat Mutu Service = SMS)* terkait permohonan, sertifikasi SMKHP dan permasalahan dalam aplikasi SiapMutu SMKHP.



Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Melakukan Koordinasi dengan Tim Verifikator SMKHP lingkup Stasiun KIPM Kupang	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025
Melakukan Koordinasi dengan Administrator Pusat terkait aplikasi Siapmutu SMKHP	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025
Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi SMKHP	Timja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Pasca Panen	Triwulan 3,4 Tahun 2025

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang



Ridwan, S.St.Pi

Kupang, 5 Juli 2025
Ketua Tim Pengendalian Mutu



Prinston S. Bella, A.Pi

Lampiran 1.

TABEL CAPAIAN KINERJA SERTIFIKASI SMKHP
LINGKUP SMKHP KUPANG
TRIWULAN II 2025

No	Nama Satker	Target (%)	Jumlah SMKHP Terbit	Jumlah SMKHP ditolak Negara	%
1.	Stasiun KIPM Kupang	99	265	265	100

TABEL SERTIFIKASI PENERBITAN SMKHP
LINGKUP SKIPM KUPANG
TRIWULAN II 2025

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah SMKHP Terbit	Jumlah Penolakan Negara Tujuan	%
			A	B	X
1.	April	94	94	0	100
2.	Mei	91	91	0	100
3.	Juni	80	80	0	100
Jumlah		265	265	0	100

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG TRIWULAN II TAHUN 2025

Nama Indikator : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama Timja : Dukungan Manajerial

Periode Laporan : Triwulan II Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target		85	85						
Realisasi		99,78	99,78						
% Capaian		117,39	117,39						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Rumus perhitungan nilai IKPA adalah sebagai berikut:

$$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun KIPM Kupang yaitu sebesar 99,78 (sesuai Nilai IKPA pada aplikasi Monev PA Kementerian Keuangan) dari target pada Triwulan II sebesar 92 dan nilai realisasi mencapai 117,39%.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I KUPANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.26	100.00	79.83	80%	0.00	99.78
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.13				100.00				

Screenshoot Nila IKPA



Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang

Ridwan, S.St.Pi

Kupang, 14 Juli 2025
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Siti Nurbaity Kartika Apriani

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025

Tanggal : 09 Juli 2025

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 2150/SJ.1/RC.610/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Triwulan II Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB (sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2025 Tanggal 2 Juni 2025 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025).
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 sebesar 95,16 dari target nilai 84,00
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester I tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker lingkup KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup unit kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, dan Sinergi (SAILS)**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Tugas Pengawasan Pengendalian Kebijakan Program Prioritas KKP
3. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.04	87.71	100.00	100.00	98.62	100.00	95.16	100%	0.00	95.16
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.76	17.54	10.00	10.00	9.86	25.00				
			Nilai Aspek	92.52		96.58				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	93.73	98.04	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	100%	0.00	98.67
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	14.06	19.61	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	96.87		99.51				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	92.28	98.44	100.00	100.00	98.08	100.00	98.34	100%	0.00	98.34
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.84	19.69	10.00	10.00	9.81	25.00				
			Nilai Aspek	96.14		99.13				100.00				
3	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	91.87	95.93	100.00	100.00	100.00	100.00	97.97	100%	0.00	97.97
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.78	19.19	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	95.94		98.98				100.00				
4	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.52	97.06	100.00	100.00	97.48	100.00	97.59	100%	0.00	97.59
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.43	19.41	10.00	10.00	9.75	25.00				
			Nilai Aspek	94.76		98.64				100.00				
5	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	83.58	99.76	100.00	100.00	97.71	100.00	97.26	100%	0.00	97.26
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.54	19.95	10.00	10.00	9.77	25.00				
			Nilai Aspek	91.79		99.37				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	81.30	100.00	100.00	100.00	100.00	97.20	100%	0.00	97.20	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	12.20	20.00	10.00	10.00	10.00					25.00
			Nilai Aspek	90.65			100.00							100.00
7	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	83.71	97.99	100.00	100.00	99.52	97.11	100%	0.00	97.11	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	12.56	19.60	10.00	10.00	9.95					25.00
			Nilai Aspek	91.86			99.38							100.00
8	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	80.29	70.13	100.00	100.00	98.09	90.88	100%	0.00	90.88	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	12.04	14.03	10.00	10.00	9.81					25.00
			Nilai Aspek	90.15			92.06							100.00
9	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	100.00	77.24	70.73	100.00	100.00	99.88	90.72	100%	0.00	90.72	
			Bobot	10	15	20	10	10	10					25
			Nilai Akhir	10.00	11.59	14.15	10.00	10.00	9.99					25.00
			Nilai Aspek	88.62			92.65							100.00



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
3	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
4	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

5	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
6	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
7	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
8	039	032	249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
9	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
10	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

11	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
12	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
13	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
14	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
15	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
16	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.29	100.00	50.00	50%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

17	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
18	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
19	012	032	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
20	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.93	100.00	79.99	80%	0.00	99.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.97				100.00				
21	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.68	100.00	79.97	80%	0.00	99.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.84				100.00				
22	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.47	100.00	99.95	100%	0.00	99.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

23	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.14	100.00	99.91	100%	0.00	99.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.78				100.00				
24	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.03	100.00	99.90	100%	0.00	99.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.76				100.00				
25	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	100.00	99.88	100%	0.00	99.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.70				100.00				
26	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.53	100.00	99.85	100%	0.00	99.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.63				100.00				
27	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.77	100.00	79.88	80%	0.00	99.85
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.88	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.39				100.00				
28	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.39	100.00	99.84	100%	0.00	99.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.60				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

29	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.31	100.00	99.83	100%	0.00	99.83
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.58				100.00				
30	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.26	100.00	79.83	80%	0.00	99.78
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.13				100.00				
31	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	97.81	100.00	89.78	90%	0.00	99.76
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	0.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.27				100.00				
32	050	032	649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	97.65	100.00	79.77	80%	0.00	99.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.83				100.00				
33	062	032	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	Nilai	100.00	100.00	99.49	0.00	0.00	98.59	100.00	79.76	80%	0.00	99.70
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.90	0.00	0.00	9.86	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.04				100.00				
34	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	98.53	100.00	0.00	100.00	100.00	89.71	90%	0.00	99.67
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.71	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.51				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

35	134	032	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	100.00	99.39	100.00	100.00	96.85	100.00	99.56	100%	0.00	99.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.88	10.00	10.00	9.68	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.06				100.00				
36	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.78	100.00	99.48	100%	0.00	99.48
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.70				100.00				
37	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.10	100.00	99.41	100%	0.00	99.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.52				100.00				
38	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	Nilai	100.00	100.00	97.31	0.00	0.00	100.00	100.00	79.46	80%	0.00	99.33
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.46	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.66				100.00				
39	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.33	100.00	99.23	100%	0.00	99.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.23	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.08				100.00				
40	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	93.73	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.06	100%	0.00	99.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.06	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.87		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

41	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	93.23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.98	100%	0.00	98.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.98	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.62		100.00				100.00				
42	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	89.78	100.00	98.98	100%	0.00	98.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	8.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.44				100.00				
43	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	94.80	100.00	0.00	0.00	99.48	100.00	79.17	80%	0.00	98.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.22	20.00	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	97.40		99.74				100.00				
44	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Nilai	100.00	92.60	100.00	100.00	100.00	99.85	100.00	98.88	100%	0.00	98.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.89	20.00	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	96.30		99.96				100.00				
45	037	032	427624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	Nilai	100.00	92.81	100.00	100.00	100.00	99.47	100.00	98.87	100%	0.00	98.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	10.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	96.41		99.87				100.00				
46	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	90.62	100.00	79.06	80%	0.00	98.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.06	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		95.31				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

47	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	94.07	100.00	0.00	0.00	99.31	100.00	79.04	80%	0.00	98.80
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	20.00	0.00	0.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	97.04		99.66				100.00				
48	017	032	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	Nilai	100.00	93.38	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	79.01	80%	0.00	98.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.01	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.69		100.00				100.00				
49	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	Nilai	100.00	91.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.67	100%	0.00	98.67
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.67	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.55		100.00				100.00				
50	001	032	649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	92.80	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	78.92	80%	0.00	98.65
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.40		100.00				100.00				
51	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	Nilai	100.00	90.91	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.64	100%	0.00	98.64
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.46		100.00				100.00				
52	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	Nilai	100.00	90.38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.56	100%	0.00	98.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.56	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.19		100.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

53	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Nilai	100.00	90.74	99.74	100.00	100.00	99.60	100.00	98.52	100%	0.00	98.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.61	19.95	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	95.37		99.84				100.00				
54	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	Nilai	100.00	94.60	98.59	100.00	100.00	95.99	100.00	98.51	100%	0.00	98.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	19.72	10.00	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	97.30		98.64				100.00				
55	048	032	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	Nilai	100.00	90.96	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	88.64	90%	0.00	98.49
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	20.00	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.48		100.00				100.00				
56	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	92.85	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	68.93	70%	0.00	98.47
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.43		100.00				100.00				
57	045	032	649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	89.76	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.46	100%	0.00	98.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.88		100.00				100.00				
58	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	Nilai	100.00	92.70	97.84	100.00	100.00	0.00	100.00	68.91	70%	0.00	98.44
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.35		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

59	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	92.47	99.29	0.00	0.00	100.00	100.00	78.73	80%	0.00	98.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.87	19.86	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.24		99.65				100.00				
60	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	Nilai	100.00	92.20	99.37	0.00	0.00	99.51	100.00	78.65	80%	0.00	98.32
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.83	19.87	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	96.10		99.44				100.00				
61	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	92.55	98.54	100.00	100.00	97.21	100.00	98.31	100%	0.00	98.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.88	19.71	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	96.28		98.94				100.00				
62	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	91.39	98.97	100.00	0.00	99.66	100.00	88.47	90%	0.00	98.30
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.71	19.79	10.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	95.70		99.54				100.00				
63	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	88.96	100.00	100.00	100.00	99.44	100.00	98.29	100%	0.00	98.29
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.34	20.00	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	94.48		99.86				100.00				
64	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	Nilai	100.00	88.53	99.81	100.00	100.00	100.00	100.00	98.24	100%	0.00	98.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.28	19.96	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.27		99.95				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

65	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	Nilai	100.00	88.38	99.90	100.00	100.00	100.00	100.00	98.24	100%	0.00	98.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	19.98	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.19		99.98				100.00				
66	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Nilai	100.00	87.45	99.90	100.00	100.00	99.97	100.00	98.09	100%	0.00	98.09
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.12	19.98	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.73		99.97				100.00				
67	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	89.10	100.00	100.00	100.00	97.18	100.00	98.08	100%	0.00	98.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.37	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	94.55		99.30				100.00				
68	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	Nilai	100.00	94.01	100.00	100.00	100.00	89.41	100.00	98.04	100%	0.00	98.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.10	20.00	10.00	10.00	8.94	25.00				
					Nilai Aspek	97.01		97.35				100.00				
69	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	89.84	99.52	0.00	0.00	100.00	100.00	78.38	80%	0.00	97.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.48	19.90	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.92		99.76				100.00				
70	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	Nilai	100.00	86.53	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.98	100%	0.00	97.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.98	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.27		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

71	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	Nilai	100.00	88.60	98.13	100.00	100.00	100.00	100.00	97.92	100%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.63	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.30		99.53				100.00				
72	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	89.55	97.31	100.00	100.00	100.00	100.00	97.89	100%	0.00	97.89
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.43	19.46	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.78		99.33				100.00				
73	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	93.30	100.00	100.00	100.00	88.81	100.00	97.88	100%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.00	20.00	10.00	10.00	8.88	25.00				
					Nilai Aspek	96.65		97.20				100.00				
74	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	88.71	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	78.31	80%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.31	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.36		100.00				100.00				
75	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	Nilai	100.00	88.75	100.00	0.00	0.00	99.81	100.00	78.29	80%	0.00	97.87
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.31	20.00	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.38		99.91				100.00				
76	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	Nilai	100.00	85.61	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.84	100%	0.00	97.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.84	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.81		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

77	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	Nilai	100.00	85.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.80	100%	0.00	97.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.80	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.67		100.00				100.00				
78	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.29	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.79	100%	0.00	97.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.79	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.65		100.00				100.00				
79	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	89.56	98.85	100.00	100.00	95.88	100.00	97.79	100%	0.00	97.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.43	19.77	10.00	10.00	9.59	25.00				
					Nilai Aspek	94.78		98.68				100.00				
80	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	87.90	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	78.19	80%	0.00	97.73
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.95		100.00				100.00				
81	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	Nilai	100.00	86.99	98.20	100.00	100.00	100.00	100.00	97.69	100%	0.00	97.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.05	19.64	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.50		99.55				100.00				
82	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	93.11	100.00	0.00	0.00	91.05	100.00	78.07	80%	0.00	97.59
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.97	20.00	0.00	0.00	9.10	25.00				
					Nilai Aspek	96.56		95.52				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

83	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	Nilai	100.00	100.00	90.86	0.00	0.00	98.68	100.00	78.04	80%	0.00	97.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.17	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		94.77				100.00				
84	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	Nilai	100.00	85.15	98.42	100.00	100.00	100.00	100.00	97.46	100%	0.00	97.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.77	19.68	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.58		99.61				100.00				
85	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	93.45	94.59	0.00	0.00	99.73	100.00	77.91	80%	0.00	97.39
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	18.92	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	96.73		97.16				100.00				
86	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	100.00	86.48	97.09	100.00	100.00	100.00	100.00	97.39	100%	0.00	97.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	19.42	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.24		99.27				100.00				
87	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	82.58	100.00	100.00	100.00	99.89	100.00	97.38	100%	0.00	97.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.39	20.00	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	91.29		99.97				100.00				
88	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	86.72	100.00	100.00	99.60	100.00	97.30	100%	0.00	97.30
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	17.34	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.58				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

89	136	032	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	86.88	98.97	0.00	0.00	100.00	100.00	77.83	80%	0.00	97.28
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.03	19.79	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.44		99.49				100.00				
90	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	Nilai	100.00	81.26	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.19	100%	0.00	97.19
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.19	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.63		100.00				100.00				
91	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	84.43	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.66	80%	0.00	97.08
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.66	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.22		100.00				100.00				
92	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	Nilai	100.00	86.91	100.00	100.00	100.00	90.34	100.00	97.07	100%	0.00	97.07
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	20.00	10.00	10.00	9.03	25.00				
					Nilai Aspek	93.46		97.59				100.00				
93	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	Nilai	100.00	86.91	96.60	100.00	0.00	100.00	100.00	87.36	90%	0.00	97.06
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	19.32	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.46		98.87				100.00				
94	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	85.49	100.00	100.00	100.00	92.09	100.00	97.03	100%	0.00	97.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	20.00	10.00	10.00	9.21	25.00				
					Nilai Aspek	92.75		98.02				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

95	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	82.46	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.37	80%	0.00	96.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.37	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.23		100.00				100.00				
96	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	Nilai	100.00	77.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.70	100%	0.00	96.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.70	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.99		100.00				100.00				
97	015	032	649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	78.27	100.00	100.00	100.00	98.53	100.00	96.59	100%	0.00	96.59
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.74	20.00	10.00	10.00	9.85	25.00				
					Nilai Aspek	89.14		99.63				100.00				
98	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.16	95.51	100.00	100.00	94.03	100.00	96.58	100%	0.00	96.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.07	19.10	10.00	10.00	9.40	25.00				
					Nilai Aspek	93.58		97.38				100.00				
99	068	032	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nilai	100.00	83.01	100.00	0.00	0.00	97.73	100.00	77.22	80%	0.00	96.53
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.45	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	91.51		98.87				100.00				
100	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	Nilai	100.00	78.47	100.00	100.00	100.00	97.17	100.00	96.49	100%	0.00	96.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.77	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	89.24		99.29				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

101	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	100.00	99.85	100.00	100.00	100.00	86.01	96.47	100%	0.00	96.47
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.97	10.00	10.00	10.00	21.50				
					Nilai Aspek	100.00		99.96				86.01				
102	123	032	427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	Nilai	100.00	81.08	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.16	80%	0.00	96.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.16	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.54		100.00				100.00				
103	178	032	340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	83.33	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	67.50	70%	0.00	96.43
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.67		100.00				100.00				
104	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100.00	86.12	97.55	0.00	0.00	97.05	100.00	77.13	80%	0.00	96.42
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.92	19.51	0.00	0.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	93.06		97.30				100.00				
105	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	85.44	95.62	100.00	100.00	94.75	100.00	96.41	100%	0.00	96.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	19.12	10.00	10.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	92.72		97.59				100.00				
106	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	Nilai	100.00	82.83	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	67.42	70%	0.00	96.32
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.42	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.42		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

107	043	032	649657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100.00	81.97	98.76	0.00	0.00	100.00	100.00	77.05	80%	0.00	96.31
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.30	19.75	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.99		99.38				100.00				
108	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	Nilai	100.00	89.90	100.00	0.00	0.00	85.57	100.00	77.04	80%	0.00	96.30
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.49	20.00	0.00	0.00	8.56	25.00				
					Nilai Aspek	94.95		92.79				100.00				
109	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	86.47	100.00	0.00	0.00	90.18	100.00	76.99	80%	0.00	96.24
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	20.00	0.00	0.00	9.02	25.00				
					Nilai Aspek	93.24		95.09				100.00				
110	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Nilai	100.00	86.48	96.92	0.00	0.00	94.70	100.00	76.83	80%	0.00	96.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	19.38	0.00	0.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	93.24		95.81				100.00				
111	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	Nilai	100.00	84.28	100.00	0.00	100.00	87.56	100.00	86.40	90%	0.00	96.00
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.64	20.00	0.00	10.00	8.76	25.00				
					Nilai Aspek	92.14		95.85				100.00				
112	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	Nilai	100.00	85.41	100.00	0.00	0.00	89.87	100.00	76.80	80%	0.00	96.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.81	20.00	0.00	0.00	8.99	25.00				
					Nilai Aspek	92.71		94.93				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

113	061	032	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	84.22	100.00	0.00	0.00	90.82	100.00	76.71	80%	0.00	95.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.63	20.00	0.00	0.00	9.08	25.00				
					Nilai Aspek	92.11		95.41				100.00				
114	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Nilai	100.00	90.94	85.77	100.00	100.00	100.00	100.00	95.80	100%	0.00	95.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.64	17.15	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.47		96.44				100.00				
115	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100.00	78.39	100.00	0.00	0.00	98.39	100.00	76.60	80%	0.00	95.75
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.76	20.00	0.00	0.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	89.20		99.20				100.00				
116	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	79.11	96.97	100.00	100.00	94.55	100.00	95.72	100%	0.00	95.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.87	19.39	10.00	10.00	9.46	25.00				
					Nilai Aspek	89.56		97.88				100.00				
117	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	82.68	100.00	0.00	0.00	90.36	100.00	76.44	80%	0.00	95.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.40	20.00	0.00	0.00	9.04	25.00				
					Nilai Aspek	91.34		95.18				100.00				
118	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	81.43	100.00	100.00	100.00	91.47	96.07	95.38	100%	0.00	95.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.21	20.00	10.00	10.00	9.15	24.02				
					Nilai Aspek	90.72		97.87				96.07				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

119	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	75.93	99.26	0.00	0.00	100.00	100.00	76.24	80%	0.00	95.30
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.39	19.85	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.97		99.63				100.00				
120	178	032	645691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	76.48	100.00	0.00	0.00	96.90	100.00	76.16	80%	0.00	95.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.47	20.00	0.00	0.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	88.24		98.45				100.00				
121	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	Nilai	100.00	73.48	95.86	100.00	100.00	99.75	100.00	95.17	100%	0.00	95.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.02	19.17	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	86.74		98.90				100.00				
122	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	68.31	100.00	100.00	100.00	99.06	100.00	95.15	100%	0.00	95.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.25	20.00	10.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	84.16		99.76				100.00				
123	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	85.06	91.74	100.00	100.00	89.75	100.00	95.08	100%	0.00	95.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.76	18.35	10.00	10.00	8.98	25.00				
					Nilai Aspek	92.53		95.37				100.00				
124	014	032	567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	Nilai	100.00	84.96	100.00	0.00	0.00	100.00	91.25	75.56	80%	0.00	94.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.74	20.00	0.00	0.00	10.00	22.81				
					Nilai Aspek	92.48		100.00				91.25				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

125	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	90.98	100.00	100.00	100.00	93.54	84.93	94.23	100%	0.00	94.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.65	20.00	10.00	10.00	9.35	21.23				
					Nilai Aspek	95.49		98.39				84.93				
126	063	032	567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	78.23	98.87	0.00	0.00	88.52	100.00	75.36	80%	0.00	94.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.73	19.77	0.00	0.00	8.85	25.00				
					Nilai Aspek	89.12		93.69				100.00				
127	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	80.61	100.00	100.00	100.00	67.63	100.00	93.85	100%	0.00	93.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.09	20.00	10.00	10.00	6.76	25.00				
					Nilai Aspek	90.31		91.91				100.00				
128	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	79.93	100.00	0.00	0.00	80.69	100.00	75.06	80%	0.00	93.82
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.99	20.00	0.00	0.00	8.07	25.00				
					Nilai Aspek	89.97		90.34				100.00				
129	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	Nilai	100.00	82.99	95.37	100.00	100.00	100.00	87.67	93.44	100%	0.00	93.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.45	19.07	10.00	10.00	10.00	21.92				
					Nilai Aspek	91.50		98.84				87.67				
130	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	100.00	66.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.20	100%	0.00	93.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	13.20	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		91.50				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

131	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	88.29	71.46	100.00	100.00	99.75	100.00	92.51	100%	0.00	92.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.24	14.29	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	94.15		92.80				100.00				
132	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nilai	100.00	100.00	60.09	100.00	100.00	100.00	100.00	92.02	100%	0.00	92.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	12.02	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		90.02				100.00				
133	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	94.20	100.00	0.00	0.00	100.00	77.31	73.46	80%	0.00	91.82
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	0.00	10.00	19.33				
					Nilai Aspek	97.10		100.00				77.31				
134	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	Nilai	100.00	100.00	58.59	100.00	100.00	97.36	100.00	91.45	100%	0.00	91.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	11.72	10.00	10.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		88.99				100.00				
135	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	100.00	55.86	100.00	100.00	99.41	100.00	91.11	100%	0.00	91.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	11.17	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		88.82				100.00				
136	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	85.46	97.56	100.00	100.00	100.00	74.91	91.06	100%	0.00	91.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	19.51	10.00	10.00	10.00	18.73				
					Nilai Aspek	92.73		99.39				74.91				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

137	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	Nilai	100.00	73.34	100.00	100.00	100.00	89.26	83.20	90.73	100%	0.00	90.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.00	20.00	10.00	10.00	8.93	20.80				
					Nilai Aspek	86.67		97.32				83.20				
138	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	Nilai	100.00	84.45	69.62	100.00	0.00	100.00	100.00	81.59	90%	0.00	90.66
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.67	13.92	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.23		89.87				100.00				
139	134	032	039163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	55.90	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.39	70%	0.00	90.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.39	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.95		100.00				100.00				
140	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	100.00	74.12	72.15	100.00	100.00	100.00	100.00	90.55	100%	0.00	90.55
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.12	14.43	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.06		93.04				100.00				
141	037	032	229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	55.48	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.32	70%	0.00	90.46
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.32	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.74		100.00				100.00				
142	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Nilai	100.00	100.00	51.95	100.00	100.00	100.00	100.00	90.39	100%	0.00	90.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.39	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		87.99				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

143	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	70.18	87.71	100.00	100.00	87.11	94.17	90.32	100%	0.00	90.32
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.53	17.54	10.00	10.00	8.71	23.54				
					Nilai Aspek	85.09		93.70				94.17				
144	030	032	049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	53.34	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.00	70%	0.00	90.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.67		100.00				100.00				
145	009	032	329087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	52.88	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.93	70%	0.00	89.90
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.93	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.44		100.00				100.00				
146	020	032	299391	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	51.12	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.67	70%	0.00	89.53
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.67	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.56		100.00				100.00				
147	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	67.22	71.44	100.00	100.00	100.00	100.00	89.37	100%	0.00	89.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.08	14.29	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.61		92.86				100.00				
148	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	Nilai	100.00	89.03	100.00	0.00	0.00	99.40	72.73	71.48	80%	0.00	89.35
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.35	20.00	0.00	0.00	9.94	18.18				
					Nilai Aspek	94.52		99.70				72.73				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

149	135	032	059190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
150	038	032	239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
151	015	032	309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
152	061	032	219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				100.00				
153	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	100.00	83.39	100.00	100.00	100.00	100.00	63.21	88.31	100%	0.00	88.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.51	20.00	10.00	10.00	10.00	15.80				
					Nilai Aspek	91.70		100.00				63.21				
154	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	Nilai	100.00	100.00	68.97	100.00	100.00	83.78	82.20	87.72	100%	0.00	87.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	13.79	10.00	10.00	8.38	20.55				
					Nilai Aspek	100.00		88.19				82.20				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

155	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	Nilai	100.00	69.09	64.61	100.00	0.00	100.00	100.00	78.29	90%	0.00	86.98
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.36	12.92	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.55		88.20				100.00				
156	039	032	690993	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
157	016	032	690995	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
158	015	032	690998	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
159	009	032	691000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
160	065	032	691001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

161	095	032	029090	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
162	134	032	039017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
163	134	032	039164	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
164	030	032	049033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
165	014	032	119038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
166	045	032	159037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

167	046	032	169034	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
168	051	032	189036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
169	136	032	199035	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
170	037	032	229111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
171	038	032	239067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
172	039	032	249086	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

173	062	032	289028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
174	020	032	299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
175	015	032	309039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
176	009	032	329011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
177	009	032	329088	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
178	065	032	330094	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

179	178	032	340151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
180	178	032	691002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
181	134	032	691010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
182	008	032	691016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
183	012	032	691017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
184	042	032	691020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

185	061	032	691028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
186	037	032	691029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
187	009	032	691038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
188	175	032	691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
189	095	032	691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
190	030	032	691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

191	135	032	691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
192	001	032	691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
193	123	032	691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
194	010	032	691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
195	008	032	691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
196	012	032	691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

197	014	032	691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
198	017	032	691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
199	042	032	691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
200	043	032	691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
201	045	032	691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
202	046	032	691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

203	049	032	691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
204	051	032	691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
205	136	032	691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
206	060	032	691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
207	061	032	691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
208	037	032	691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

209	038	032	691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
210	039	032	691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
211	063	032	691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
212	016	032	691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
213	062	032	691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
214	020	032	691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

215	015	032	691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00					
216	050	032	691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00					
217	009	032	691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00					
218	065	032	691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00					
219	178	032	691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00					
220	185	032	691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
				Bobot	10	15	20	0	0	0	25					
				Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00					
				Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00					

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

221	134	032	690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
222	012	032	690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
223	020	032	690952	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
224	175	032	690970	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
225	095	032	690971	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
226	134	032	690972	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

227	030	032	690973	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
228	135	032	690974	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
229	001	032	690975	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
230	123	032	690976	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
231	008	032	690978	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
232	012	032	690979	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

233	014	032	690980	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
234	043	032	690983	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
235	045	032	690984	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
236	046	032	690985	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
237	049	032	690986	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
238	051	032	690987	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

239	136	032	690988	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
240	060	032	690989	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
241	037	032	690991	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
242	038	032	690992	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				100.00				
243	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Nilai	100.00	82.87	96.65	100.00	100.00	84.74	61.35	85.57	100%	0.00	85.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.43	19.33	10.00	10.00	8.47	15.34				
					Nilai Aspek	91.44		95.35				61.35				
244	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	74.99	95.41	0.00	0.00	100.00	72.00	68.33	80%	0.00	85.41
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.25	19.08	0.00	0.00	10.00	18.00				
					Nilai Aspek	87.50		97.71				72.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

245	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	81.96	99.39	0.00	0.00	0.00	80.09	42.32	50%	0.00	84.63
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02				
					Nilai Aspek	90.98		99.39				80.09				
246	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	67.73	63.17	0.00	0.00	93.18	100.00	67.11	80%	0.00	83.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.16	12.63	0.00	0.00	9.32	25.00				
					Nilai Aspek	83.87		78.17				100.00				
247	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	78.41	100.00	100.00	100.00	78.55	49.15	81.90	100%	0.00	81.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.76	20.00	10.00	10.00	7.86	12.29				
					Nilai Aspek	89.21		94.64				49.15				
248	063	032	690949	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				
249	008	032	099326	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				
250	061	032	219099	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

251	060	032	209118	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		50.00				100.00				
252	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	Nilai	100.00	54.82	57.45	0.00	0.00	0.00	100.00	54.71	70%	0.00	78.16
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.22	11.49	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.41		57.45				100.00				
253	175	032	019063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
254	095	032	029173	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
255	030	032	049098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
256	135	032	059191	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

257	001	032	069145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
258	001	032	069146	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
259	123	032	079137	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
260	010	032	089144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
261	012	032	109132	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
262	014	032	119142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

263	017	032	129124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
264	042	032	139138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
265	042	032	139139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
266	043	032	149124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
267	043	032	149125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
268	045	032	159118	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

269	045	032	159119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
270	046	032	169124	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
271	046	032	169125	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
272	049	032	179114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
273	051	032	189143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
274	051	032	189144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

275	136	032	199138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
276	038	032	239139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
277	039	032	249170	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
278	016	032	269120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
279	016	032	269121	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
280	015	032	309171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

281	050	032	319098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
282	065	032	339096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
283	065	032	339097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
284	185	032	632335	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
285	175	032	690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
286	095	032	690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

287	030	032	690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
288	135	032	690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
289	001	032	690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
290	123	032	690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
291	008	032	690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
292	014	032	690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

293	017	032	690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
294	042	032	690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
295	043	032	690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
296	045	032	690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
297	046	032	690940	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
298	051	032	690942	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

299	061	032	690945	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
300	037	032	690946	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
301	038	032	690947	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
302	039	032	690948	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
303	016	032	690950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
304	062	032	690951	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

305	015	032	690953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
306	050	032	690954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
307	009	032	690955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
308	065	032	690956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
309	178	032	690957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
310	185	032	690958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

311	068	032	690962	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
312	068	032	690969	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
313	062	032	690996	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
314	020	032	690997	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
315	175	032	691008	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
316	095	032	691009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

317	030	032	691011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
318	135	032	691012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
319	001	032	691013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
320	123	032	691014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
321	010	032	691015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
322	014	032	691018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

323	017	032	691019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
324	043	032	691021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
325	045	032	691022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
326	046	032	691023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
327	049	032	691024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
328	051	032	691025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

329	136	032	691026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
330	060	032	691027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
331	038	032	691030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
332	039	032	691031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
333	063	032	691032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
334	016	032	691033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

335	062	032	691034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
336	020	032	691035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
337	015	032	691036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
338	050	032	691037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
339	065	032	691039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
340	178	032	691040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

341	185	032	691041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
342	134	032	691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
343	185	032	691247	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				100.00				
344	136	032	199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	52.00	100.00	0.00	0.00	0.00	47.68	49.72	70%	0.00	71.03
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.80	20.00	0.00	0.00	0.00	11.92				
					Nilai Aspek	76.00		100.00				47.68				
345	060	032	209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	53.02	100.00	0.00	0.00	0.00	37.61	47.36	70%	0.00	67.65
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.95	20.00	0.00	0.00	0.00	9.40				
					Nilai Aspek	76.51		100.00				37.61				
346	049	032	179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	56.57	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.99	70%	0.00	65.69
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.49	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	78.29		100.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

347	010	032	089143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	53.12	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.47	70%	0.00	64.95
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.97	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	76.56		100.00				30.00				
348	017	032	129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	51.94	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.29	70%	0.00	64.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.79	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.97		100.00				30.00				
349	175	032	019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		100.00				30.00				
350	060	032	209033	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
351	017	032	129034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
352	014	032	119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

353	010	032	089004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
354	123	032	079136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				30.00				
355	095	032	029172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				30.00				
356	050	032	690999	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
357	063	032	690994	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
358	061	032	690990	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

359	010	032	690977	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
360	050	032	319033	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
361	063	032	259038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
362	061	032	219030	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		50.00				0.00				
363	050	032	319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
364	185	032	691003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

365	049	032	690941	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
366	136	032	690943	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
367	060	032	690944	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
368	066	032	690959	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
369	113	032	690960	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
370	085	032	690961	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

371	066	032	690966	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
372	113	032	690967	DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
373	017	032	690981	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
374	062	032	289113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
375	062	032	289112	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
376	063	032	259108	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

377	063	032	259107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
378	042	032	690982	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
379	085	032	690968	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				
380	010	032	690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	75.00		50.00				0.00				

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN II TAHUN 2025

Nama Indikator : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama Timja : Dukungan Manajerial

Periode Laporan : Triwulan II Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target		75	75						
Realisasi		86	86						
% Capaian		114,67	114,67						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu sebesar 86 (sesuai data *dashboard* IP ASN KKP) dari target pada Triwulan II sebesar 75 dan nilai realisasi mencapai 114,67%.

Not Secure http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/uniker/12967q=kupa 130%

Kinerja SMART | KEMENKUMHUR | Unggah Video Tappin... (4) Etika, Integritas da... e-SAKIP REVIEW Sistem Informasi Man... 2022 - E Money PP39 OM-SPAN KLC: Dashboard SWIPE AP - Sekumpul... Other Bookmarks

IP ASN 2025 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerja... **Cari**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM KUPANG	12	22.08	88.32 %	33.08	82.7 %	25.83	86.1 %	5	100 %	86	TINGGI

< >

25°C Cerah Search 08:06 10/07/2025

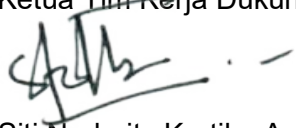
Screenshoot Dashboard Web IP ASN KKP

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang


Ridwan S. St. Pi



Kupang, 14 Juli 2025
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial


Siti Nurbaity Kartika Apriani

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1105/SJ.3/TU.140/VII/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal
4. Para Sekretaris Badan

Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

Hal : Capaian IKU IP ASN Semester I Tahun 2025

Tanggal : 8 Juli 2025

Dalam rangka monitoring capaian IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- nilai IP ASN KKP per 7 Juli 2025 pada Dashboard IP ASN KKP melalui domain <https://ipasn.sdmao.id/> sebesar 82,09 (kategori tinggi), terdiri dari:
 - kualifikasi sebesar 22,48;
 - kompetensi sebesar 29,11;
 - kinerja sebesar 25,50;
 - disiplin sebesar 4,99.
- distribusi nilai IPASN KKP berdasarkan capaian pada unit organisasi sebagai berikut:

No.	Unor	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total	Ket
1)	Setjen	22,59	31,10	26,12	5	84,81	Tinggi
2)	DJPRL	23,17	27,54	25,13	5	80,85	Sedang
3)	DJPK	22,33	31,50	26,23	4,99	85,05	Tinggi
4)	DJPT	22,56	30,42	26,78	5	84,76	Tinggi
5)	DJPB	22,08	29,29	25,64	5	82,02	Tinggi
6)	DJPDSPKP	23,34	28,38	25,17	5	81,89	Tinggi
7)	DJPSDKP	22,75	29,67	25,07	4,99	82,48	Tinggi
8)	ITJEN	22,33	29,33	24,71	5	81,36	Tinggi
9)	BPPSDMKP	22,37	27,84	25,16	4,99	80,36	Sedang
10)	BPPMHKP	22,68	30,24	25,10	4,98	83,00	Tinggi

- pengukuran nilai IP ASN KKP terintegrasi dengan peremajaan data pada aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN dengan memperhatikan penyesuaian bobot dimensi sebagaimana lampiran surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 tanggal 20 Juni 2024.
- peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN masing-masing pegawai diperlukan sebagai salah satu dimensi yang mempengaruhi nilai capaian IP ASN, terdapat perubahan perhitungan komponen diklat 20 JP yang dihitung secara proporsional pada saat pegawai melakukan *update* data riwayat sertifikasi di menu "kursus" dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.

5. **batas akhir** penghitungan nilai capaian IP ASN Semester I Tahun 2025 pada tanggal **10 Juli 2025** dapat dipantau melalui dashboard <https://ipasn.sdmao.id/> selanjutnya digunakan sebagai nilai realisasi IKU IP ASN organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dida Daniarsyah

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Nama Indikator : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama Timja : Dukungan Manajerial

Periode Laporan : Triwulan II Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	85	85	85						
Realisasi	100	100	100						
% Capaian	117,65	117,65	117,65						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

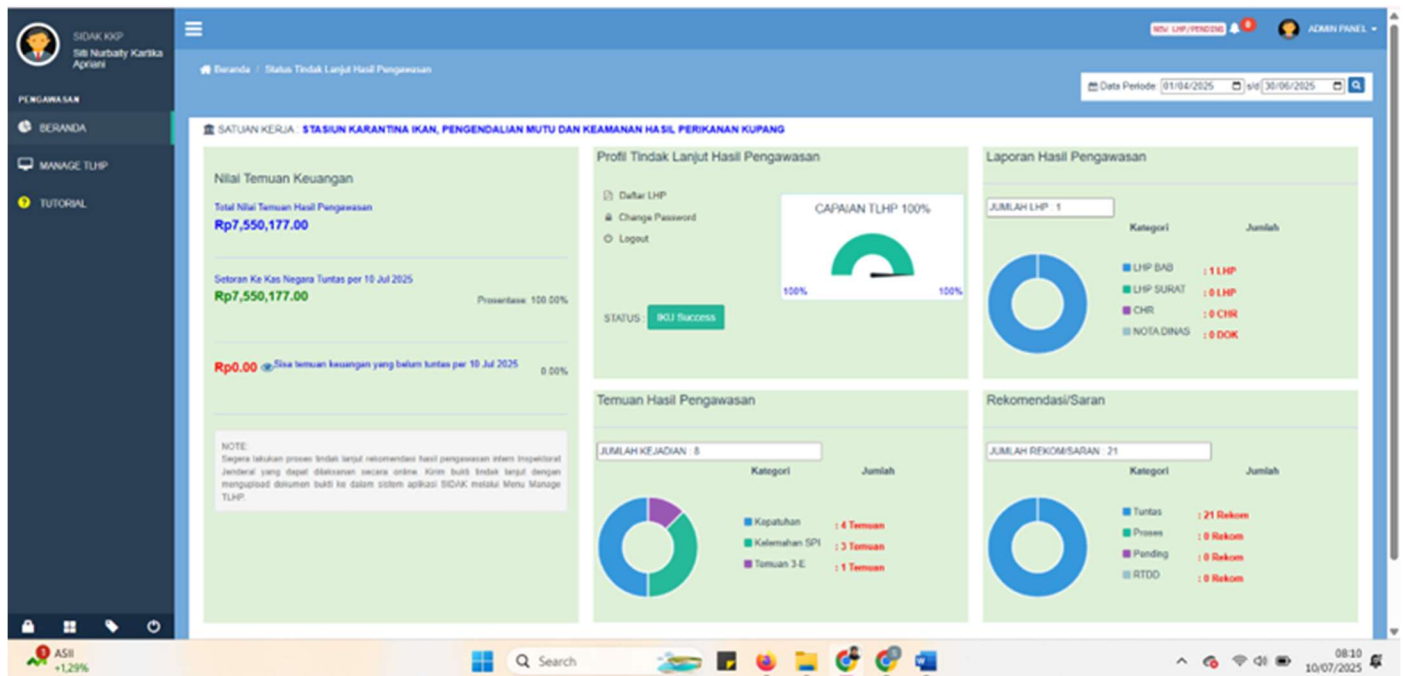
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran.

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target

Capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar 100% (sesuai *screenshot dashboard* SIDAK KKP) dari target pada Triwulan II sebesar 85%. Capaian Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Kupang ini diperoleh dari data SIDAK KKP, berdasarkan penyelesaian LHP (Laporan Hasil Pengawasan) dari Audit Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024. Penyelesaian LHP Sudah diselesaikan hingga 100%.



Screenshoot dashboard SIDAK KKP

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang



Ridwan, S.St.Pi

Kupang, 14 Juli 2025
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajeria



Siti Nurbaity Kartika Apriani

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN II TAHUN 2025

Nama Indikator : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama Timja : Dukungan Manajerial

Periode Laporan : Triwulan II Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	76	76	76						
Realisasi	100	100	100						
% Capaian	120,00	120,00	120,00						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar 100,00% (sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP) dari target pada Triwulan II sebesar 76%. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP ini diperoleh dari perhitungan berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP x 100%
Pagu Pengadaan Barang/Jasa

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

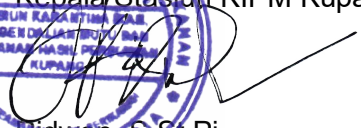
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 :

$$\frac{58,810,000}{58,810,000} \times 100\% = 100\%$$

Nilai Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP yang tertera pada Nota Dinas Plt. Kepala Biro PBJ KKP

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN (sumber data : Menu RUP - SIRUP)			PAGU TERUMUMKAN (sumber data : Rekap RUP Terumumkan - SIRUP)			% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI KIPMHK SURABAYA I	4,601,969,000	-	4,601,969,000	4,601,969,000	-	4,601,969,000	0	100.00%
2	BALAI KIPMHK MEDAN I	2,227,785,000	-	2,227,785,000	2,227,785,000	-	2,227,785,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR KIPMHK MAKASSAR	2,892,982,000	-	2,892,982,000	2,892,982,000	-	2,892,982,000	0	100.00%
4	BALAI KIPMHK DENPASAR	1,784,010,000	-	1,784,010,000	1,784,010,000	-	1,784,010,000	0	100.00%
5	STASIUN KIPMHK BATAM	1,351,261,698	-	1,351,261,698	1,351,261,698	-	1,351,261,698	0	100.00%
6	SEKRETARIAT BADAN KIPMHK	5,563,552,000	-	5,563,552,000	5,563,552,000	-	5,563,552,000	0	100.00%
7	STASIUN KIPMHK PADANG	744,295,000	-	744,295,000	744,295,000	-	744,295,000	0	100.00%
8	STASIUN KIPMHK PEKANBARU	392,002,000	-	392,002,000	392,002,000	-	392,002,000	0	100.00%
9	STASIUN KIPMHK PALEMBANG	687,840,000	-	687,840,000	687,840,000	-	687,840,000	0	100.00%
10	STASIUN KIPMHK PONTIANAK	1,490,057,000	-	1,490,057,000	1,490,057,000	-	1,490,057,000	0	100.00%
11	BALAI KIPMHK BALIKPAPAN	440,437,000	-	440,437,000	440,437,000	-	440,437,000	0	100.00%
12	BALAI KIPMHK MANADO	1,711,693,000	-	1,711,693,000	1,711,693,000	-	1,711,693,000	0	100.00%
13	STASIUN KIPMHK KENDARI	351,241,000	-	351,241,000	351,241,000	-	351,241,000	0	100.00%
14	BALAI KIPMHK MATARAM	1,082,514,000	-	1,082,514,000	1,082,514,000	-	1,082,514,000	0	100.00%
15	BALAI KIPMHK JAYAPURA	399,150,000	-	399,150,000	399,150,000	-	399,150,000	0	100.00%
16	STASIUN KIPMHK TAMPORA	-	-	-	-	-	-	0	100.00%
17	STASIUN KIPMHK KUPANG	-	58,810,000	58,810,000	-	58,810,000	58,810,000	0	100.00%
18	BALAI KIPMHK TAMPORA	1,547,155,000	-	1,547,155,000	1,547,155,000	-	1,547,155,000	0	100.00%

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang


Ridwan S. St. Pi

Kupang, 14 Juli 2025
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial


Siti Nurbaity Kartika Apriani, S.Pi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 86/SJ.7/PL.410/VII/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 9 Juli 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 148 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 10 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 09.30 WIB, masih terdapat 2 (dua) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH TERUMUMKAN dan BELUM MENGUMUMKAN di dalam aplikasi SIRUP (sebagaimana terlampir), antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus persentase 0,00%

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya persentase 100,81%

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat segera melakukan koreksi perbaikan terhadap persentase tersebut agar menjadi persentase wajar.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Sofiyanto

Ditandatangani
Secara Elektronik

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 86/SJ.7/PL.410/VII/2025
 Tanggal : 9 Juli 2025

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
 PENGADAAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode Eselon 1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 2	% Capaian Target IKU TW 2	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	42,481,346,722	42,481,346,722	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	5,933,654,000	5,933,654,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	31,003,797,075	31,003,797,075	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	233,805,135,000	233,805,135,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	312,817,524,500	312,817,524,500	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	334,777,219,000	334,777,219,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	41	162,785,749,168	162,785,749,168	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	1,978,583,640,800	1,975,572,149,800	(3,011,491,000)	Kurang Terumumkan	76.00%	99.85%	Melebihi Target
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,022,674,212,069	1,029,924,292,069	7,250,080,000	Lebih Terumumkan	76.00%	99.29%	Melebihi Target

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

C	DITJEN PERIKANAN TANGKAP		1,978,583,640,800	1,975,572,169,800	1,975,572,149,800	3,011,491,000	99.85%
1	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	15,972,735,000	15,972,735,000	15,972,735,000	-	100.00%
2	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	219,592,991,000	219,592,991,000	219,592,991,000	-	100.00%
3	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	3,685,697,000	3,685,697,000	3,685,697,000	-	100.00%
4	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	435,112,613,000	435,112,613,000	435,112,613,000	-	100.00%
5	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	3,940,604,800	3,940,604,800	3,940,604,800	-	100.00%
6	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,949,994,000	4,949,994,000	4,949,994,000	-	100.00%
7	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	1,922,347,000	1,922,347,000	1,922,347,000	-	100.00%
8	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,003,286,000	2,003,286,000	2,003,286,000	-	100.00%
9	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	3,196,346,000	3,196,346,000	3,196,346,000	-	100.00%
10	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	6,498,030,000	6,498,030,000	6,498,030,000	-	100.00%
11	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,877,458,000	2,877,458,000	2,877,458,000	-	100.00%
12	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3,011,491,000	3,011,491,000	-	3,011,491,000	0.00%
13	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,200,792,000	2,200,792,000	2,200,792,000	-	100.00%
14	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,461,000	2,089,461,000	2,089,461,000	-	100.00%
15	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	59,313,949,000	59,313,949,000	59,313,949,000	-	100.00%
16	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	36,040,719,000	36,040,719,000	36,040,719,000	-	100.00%
17	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,959,181,000	1,959,181,000	1,959,181,000	-	100.00%
18	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	3,708,065,000	3,708,065,000	3,708,065,000	-	100.00%
19	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	-	100.00%
20	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,806,316,000	2,806,316,000	2,806,316,000	-	100.00%
21	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,195,671,000	3,195,671,000	3,195,671,000	-	100.00%
22	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,874,832,000	1,874,832,000	1,874,832,000	-	100.00%
23	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	1,215,163,000	1,215,163,000	1,215,163,000	-	100.00%
24	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	2,884,668,000	2,884,668,000	2,884,668,000	-	100.00%

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

D	DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA		1,022,674,212,069	1,029,878,925,069	1,029,924,292,069	(7,250,080,000)	100.71%
1	632462	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	893,006,650,069	900,256,730,069	900,256,730,069	(7,250,080,000)	100.81%
2	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	41,051,068,000	41,005,701,000	41,051,068,000	-	100.00%
3	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	11,611,482,000	11,611,482,000	11,611,482,000	-	100.00%
4	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	6,382,408,000	6,382,408,000	6,382,408,000	-	100.00%
5	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	7,843,216,000	7,843,216,000	7,843,216,000	-	100.00%
6	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	4,855,811,000	4,855,811,000	4,855,811,000	-	100.00%
7	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	8,938,057,000	8,938,057,000	8,938,057,000	-	100.00%
8	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	8,049,166,000	8,049,166,000	8,049,166,000	-	100.00%
9	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	5,836,021,000	5,836,021,000	5,836,021,000	-	100.00%
10	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	3,033,050,000	3,033,050,000	3,033,050,000	-	100.00%
11	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	7,414,717,000	7,414,717,000	7,414,717,000	-	100.00%
12	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	6,743,509,000	6,743,509,000	6,743,509,000	-	100.00%
13	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	7,324,563,000	7,324,563,000	7,324,563,000	-	100.00%
14	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	1,253,261,000	1,253,261,000	1,253,261,000	-	100.00%
15	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,982,403,000	3,982,403,000	3,982,403,000	-	100.00%
16	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	5,348,830,000	5,348,830,000	5,348,830,000	-	100.00%



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sofiyanto

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM KUPANG
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Nama Indikator : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama Timja : Dukungan Manajerial

Periode Laporan : Triwulan II Tahun 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	88	88	88						
Realisasi	90,87	94,56	94,56						
% Capaian	103,26	107,45	107,45						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
- Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.
- Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target

Capaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar 94,56 (laporan terlampir) dari target pada Triwulan II sebesar 88. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang ini diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan kuesioner online melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/49> yang disebarkan kepada pengguna layanan. Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan II mulai April hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 94,56. Kemudian nilai SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan I hingga triwulan II 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Biaya/tarif, Sarana prasarana dan Prilaku pelaksana layanan
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Persyaratan, Selanjutnya Sistem, mekanisme dan prosedur dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Detail Nilai SKM per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,80	3,80	3,79	3,74	3,79	3,78	3,78	3,80	3,77
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	94,56 (A atau Sangat Baik)								

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggungjawab	Periode
Sosialisasi tentang pemberlakuan PNBPN volatil yang ditetapkan sebagai dasar pungutan PNBPN terhadap jasa layanan.	Timja Dukungan Manajerial	Triwulan 3 (Juli)
<i>Briefing</i> pagi untuk semua pegawai terutama bagi petugas pelayanan sebelum aktifitas bekerja dimulai untuk dapat melakukan pelayanan prima dan penuh tanggung jawab	Timja Dukungan Manajerial	Triwulan 3 (Agustus)
Peningkatan perangkat elektronik pendukung pelayanan (komputer, printer, jaringan internet) serta Publikasi persyaratan layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)	Timja Dukungan Manajerial	Triwulan 3 (September)



Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Kupang

Ridwan, S.St.Pi

Kupang, 14 Juli 2025
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Siti Nurbaity Kartika Apriani

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG
TRIWULAN II TAHUN 2025



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. 14	
2. Hasil Pengolahan Data SKM	15
3. 15	
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/49> yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	April 2025	8
2.	Pengumpulan Data	April-Juni 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2025	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juni 2025	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan I tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang dalam kurun waktu triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak 63 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 56 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 143 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	70	49%
		Perempuan	73	51%
2	Usia	Dibawah 25	0	0%
		25-45	91	64%
		46-60	11	8%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	38	27%
		D3	29	20%
		S1	73	51%
		S2	2	1%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	31	22%
		Pegawai Swasta	53	37%
		Wirausaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	2	1%

		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	12	8%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	120	84%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	6	4%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	1	1%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	1	1%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

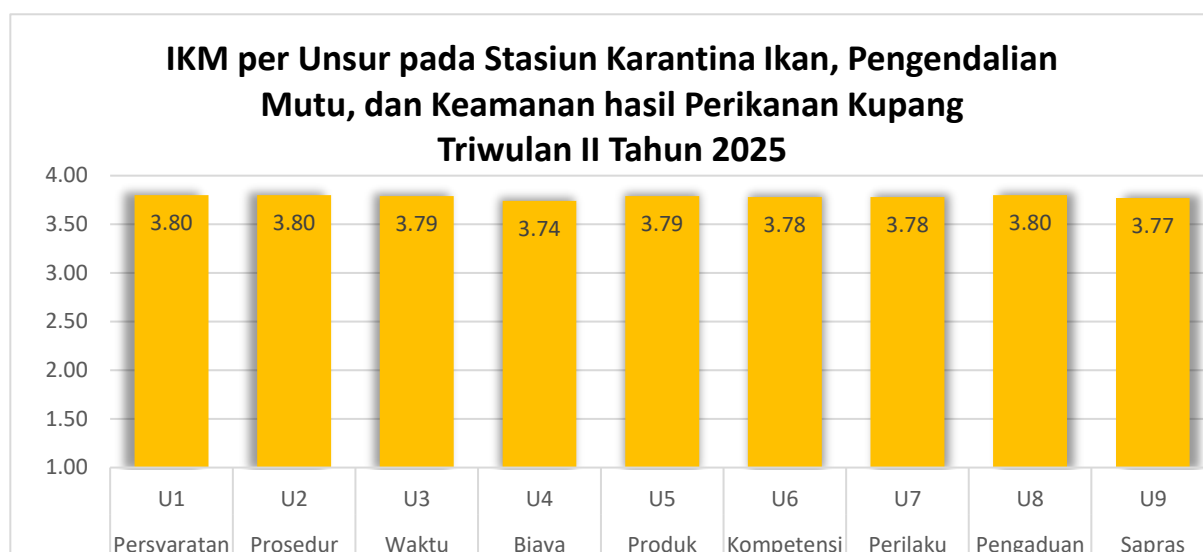
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,80	3,80	3,79	3,74	3,79	3,78	3,78	3,80	3,77
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	94,56 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan adalah Biaya/tarif mendapatkan nilai terendah yaitu 3,77. Selanjutnya Sarana dan prasarana mendapatkan nilai 3,77 adalah nilai terendah kedua dan Prilaku pelaksana pelayanan yang mendapatkan nilai 3,62 adalah nilai terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Persyaratan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,80. Selanjutnya Sistem, mekanisme dan prosedur mendapatkan nilai 3,80 dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapatkan nilai yaitu 3,80.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Pelayanannya sudah baik, semoga bisa tetap baik dan ditingkatkan lagi”.
- “Lebih baik lagi”.
- “Kalau bisa lebih di permudah lagi dalam pengajuan sertifikatnya (HACCP)”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sertifikasi SMKHP menggunakan sistem baru yaitu SIAPMUTU yang sudah mulai stabil sehingga dapat meningkatkan kecepatan proses pelayanan.
- Sarana prasarana pendukung (computer, printer dan internet) dalam pelayanan perlu dilengkapi dengan perangkat yang lebih baik untuk mendukung pelayanan prima.
- Meningkatkan layanan konsultasi tentang persyaratan dan tata cara permohonan HACCP baru sehingga meminimalisir penolakan oleh system HACCP Online.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

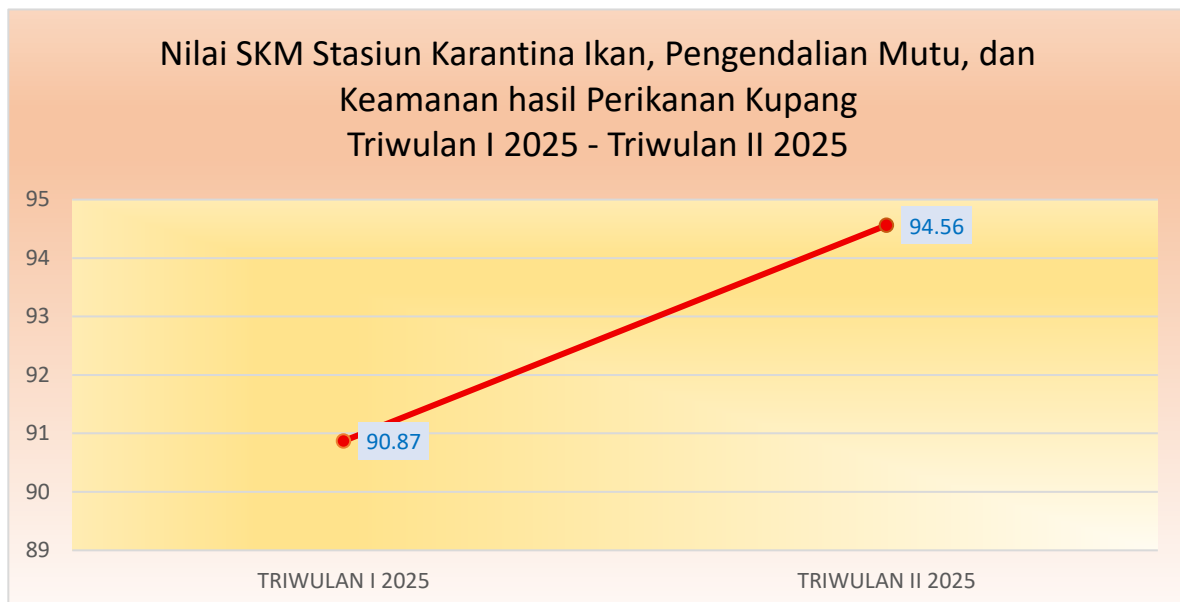
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan yang direncanakan pada bulan Agustus 2025. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2025)			Penanggung Jawab
			Juli	Ags	Sep	
1	Biaya/Tarif	Sosialisasi tentang pemberlakuan PNBP volatil yang ditetapkan sebagai dasar pungutan PNBP terhadap jasa layanan.	√			Tim Pelayanan Publik
2	Perilaku pelaksana	Briefing pagi untuk semua pegawai terutama bagi petugas pelayanan sebelum aktifitas bekerja dimulai untuk dapat melakukan pelayanan prima dan penuh tanggung jawab.		√		Tim Pelayanan Publik
3	Sarana dan Prasarana	Peningkatan perangkat elektronik pendukung pelayanan (komputer, printer, jaringan internet) serta Publikasi persyaratan layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)			√	Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan I 2025 hingga triwulan II 2025 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan II mulai April hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 94,56. Kemudian nilai SKM Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan I 2025 hingga triwulan II 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Biaya/tarif, Sarana prasarana dan Prilaku pelaksana layanan
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Persyaratan, Selanjutnya Sistem, mekanisme dan prosedur dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Kupang, 10 Juli 2025

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang




Ridwan, S.St.Pi

NIP. 19780725 200502 1 001

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Data Layanan

Pilih Layanan

☐ Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)

☐ Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eksport)

☐ Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

☐ Penerbitan Sertifikat Kebijakan Pengolahan

☐ Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pemberihan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pembiulan Pukan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik

Data Responden

Waktu Survey

19-Feb-2025 13:19

Nama

Jenis Usaha

☐ Perseorangan

☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

☐ Pria/Laki-laki

☐ Wanita/Perempuan

Usia

☐ < 25 Tahun

☐ 25 s/d 45 Tahun

☐ 46 s/d 60 Tahun

☐ > 60 Tahun

Pendidikan

☐ SD

☐ SMP

☐ SMA

☐ D3

☐ S1

☐ S2

☐ S3

Pekerjaan

☐ ASN

☐ TNI/Polri

☐ Pelaku Usaha KKP

☐ Pegawai Swasta

☐ Wirasaha Non KKP

☐ Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
(Pewat ambalasan hukum/organisasi dapat memahami persyaratan pelayanan Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP yang tersedia di situs resmi BPPN)

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

6. Bagaimana **kecepatan respon** (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat Cepat

☐ Cepat

☐ Kurang cepat

☐ Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadukan lanjut)?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/ibu tentang **kualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (sikap, keterampilan dan penampilan)

☐ Sangat Baik

☐ Baik

☐ Kurang Baik

☐ Tidak Baik

Kritik dan Saran

*) Harus diisi minimal 3 kata

Submit form

*) Pastikan anda telah mengisi seluruh pertanyaan sebelum submit

NO	APAKTERISTI	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	70	49%
		Perempuan	73	51%
2	Usia	Dibawah 25	0	0%
		25-45	91	64%
		46-60	11	8%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	38	27%
		D3	29	20%
		S1	73	51%
		S2	2	1%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/Polri	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	31	22%
		Pegawai Swasta	53	37%
		Wirasaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	2	1%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	12	8%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	120	84%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	6	4%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	1	1%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	1	1%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

NO	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		INDEKS KONVERSI	MUTU	KINERJA
U1	Persyaratan	94.93	A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	94.93	A	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian	94.72	A	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif	93.53	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	94.76	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelayanan	94.58	A	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	94.41	A	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	94.93	A	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana	94.23	A	Sangat Baik

NO	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,0000 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Triwulan I Tahun 2025



**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan
hasil Perikanan Kupang**

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan

2025

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang periode triwulan I tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan I Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	91,27	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	91,67	A
3	Waktu Penyelesaian	89,29	A
4	Biaya/Tarif	92,06	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	91,27	A
6	Kompetensi Pelaksana	90,08	A
7	Perilaku Pelaksana	90,48	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	91,27	A
9	Sarana dan Prasarana	90,48	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk

memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2025)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1	Waktu Penyelesaian	Membuat kompensasi layanan (permintaan maaf, pemberian cenderamata, air minum dan makanan ringan, pemberian sanksi kepada petugas pelayanan)	√			Tim Pelayanan Publik
2	Kompetensi Pelayanan	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan tentang kegiatan pelayanan (Kecepatan pelayanan, kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, pemahaman aplikasi SIAPMUTU dan PNBP)		√		Tim Pelayanan Publik
3	Sarana Prasarana	Peningkatan perangkat elektronik pendukung pelayanan (komputer, printer, jaringan internet) serta Publikasi persyaratan layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)			√	Tim Pelayanan Publik

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	- Membuat kompensasi layanan terhadap keterlambatan pelayanan. - Melakukan Sosialisasi pada saat morning briefing kepada petugas pelayanan tentang 9 unsur pelayanan.	Sudah	Petugas pelayanan melakukan permintaan maaf dan memberikan air minum kemasan sebagai kompensasi atas ketelambatan pelayanan Melakukan sosialisasi secara langsung setiap briefing pagi ke petugas pelayanan yang di sampaikan oleh kepala UPT, Katimja dan Tim pelayanan publik.	 	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

2	- Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan tentang kegiatan pelayanan. - Mengusulkan tambahan petugas pelayanan penerbitan SMKHP	Sudah	Melakukan training untuk menambah pengetahuan petugas pelayanan tentang Kecepatan pelayanan, kendala aplikasi OSS, pemahaman aplikasi SIAPMUTU dan PNBP Penambahan petugas pelayanan an. Abdul Majid S untuk meningkatkan pelayanan SMKHP	 	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
---	---	-------	---	--	-------------------------------------

3	- Peningkatan perangkat elektronik pendukung pelayanan (komputer, printer, jaringan internet) - Penataan ruang pelayanan dengan menambah informasi produk layanan dan informasi lain tentang perikanan.	Sudah	Memperbaiki dan menambah sarana prasarana pendukung (Laptop dan jaringan internet yang lebih baik) di counter pelayanan Penambahan banner tentang jenis-jenis ikan yang merupakan produk ekspor di Nusa Tenggara Timur	 	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
---	--	-------	--	--	-------------------------------------

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	- Membuat kompensasi layanan terhadap keterlambatan pelayanan. - Melakukan Sosialisasi pada saat morning briefing kepada petugas pelayanan tentang 9 unsur pelayanan.	Pemahaman tentang SOP pelayanan dan pemberian informasi dan kompensasi jika ada keterlambatan. Pemberitahuan melalui grup WA kantor dan penyampaian langsung pada saat briefing pagi ke semua petugas pelayanan.	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Petugas pelayanan di lingkup BPPMHKP Kupang dan pengguna jasa

2	- Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan tentang kegiatan pelayanan. - Mengusulkan tambahan petugas pelayanan penerbitan SMKHP	Selalu menyampaikan informasi terbaru terkait layanan melalui WA grup kantor maupun Ketika morning. Penambahan petugas pelayanan yang lebih kompeten	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Petugas pelayanan di lingkup BPPMHKP Kupang
3	Mengusulkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada serta menambah informasi baru di ruang pelayanan	Penataan ulang ruang pelayanan agar lebih informatif	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Bagian Tata Usaha dan petugas pelayanan di lingkup BPPMHKP

Kupang, 10 Juni 2025

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang



Ridwan, S.St.Pi

NIP. 19780725 200502 1 001